



**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 616/KEP/2007**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 616/ KEP / 2007**

### **T E N T A N G**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011**

### **WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan program pembangunan Penanggulangan Kemiskinan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarus Utamaan Gender;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011
- PERTAMA : RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang bersifat Lintas sektor dan lintas wilayah yang mencakup penciptaan kesempatan kerja, pemberdayaan, peningkatan kemampuan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA : RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dimaksudkan dipergunakan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.
- KETIGA : Penjabaran RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- KEEMPAT : Menunjuk Wakil Walikota Yogyakarta sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta dibantu Asisten Pembangunan dan Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Desember 2007**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.  
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta.  
3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.  
4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta.  
5. Kepala SKPD se Kota Yogyakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 616/KEP/2007  
TANGGAL : 8 Desember 2007**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Lingkup RAD Penanggulangan Kemiskinan	2
<b>BAB II</b>	<b>KONDISI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>4</b>
	2.1. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengangguran Secara Konseptual	4
	2.2. Faktor Penyebab Pengangguran Secara Konseptual	6
	2.3. Profil Kemiskinan Kota Yogyakarta	8
	2.3.1. Sebaran Keluarga dan Penduduk Miskin Kota Yogyakarta.	11
	2.3.2. Diskripsi Data Keluarga dan Penduduk Miskin Beserta Permasalahannya Basis Wilayah Kecamatan.	13
	2.3.3. Deskripsi Keluarga dan Penduduk Miskin dan Permasalahannya Basis Kota Yogyakarta	42
	2.3.3.1. Permasalahan Kemiskinan dan Kemampuan Pendapatan.	42
	2.3.3.2. Permasalahan Kemiskinan dan Kesempatan Kerja.	42
	2.3.3.3. Keluarga Miskin dan Kepemilikan Aset Ekonomi.	44
	2.3.3.4. Keluarga Miskin dan status Kepemilikan Tempat Tinggal.	44
	2.3.3.5. Keluarga Miskin dengan jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari	45

2.3.3.6.	Keluarga Miskin dengan Jenis alat penerangan yang digunakan	45
2.3.3.7.	Permasalahan Kemiskinan Berdasar Pangan	45
2.3.3.8.	Permasalahan Kemiskinan Berdasar Sandang	46
2.3.3.9.	Permasalahan Kemiskinan Berdasar Papan	46
2.3.3.10	Permasalahan Kemiskinan Berdasar Kesehatan	47
2.3.3.11	Permasalahan Kemiskinan Berdasar Pendidikan	48
2.3.3.12	Permasalahan Kemiskinan Berdasar Aktifitas Sosial	49
2.4.	Profil Data Pengangguran Kota Yogyakarta.	49
<b>BAB III</b>	<b>LANDASAN PELAKSANAAN</b>	<b>51</b>
3.1.	Landasan Global.	51
3.2.	Landasan Nasional	51
3.3	Landasan Regional	52
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>53</b>
4.1.	Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran berdasar Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta	53
4.1.1.	Srtategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	53
4.1.1.1	Strategi Perlindungan Sosial	53
4.1.1.2	Strategi Perluasan Kesempatan	53
4.1.1.3	Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	54
4.1.1.4	Strategi Pemberdayaan Masyarakat	55
4.1.1.5	Strategi Kemitraan	55
4.2.	Alur Pola Pikir Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	55
4.2.1.	Validasi dan pelembagaan updating data Keluarga Miskin	56
4.2.2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin.	57

4.2.3.	Pengembangan SDM Penduduk Miskin.	58
4.2.4.	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin.	58
4.2.5.	Pelebagaan Stake Holder Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Ditingkat Basis (Kelurahan)	59
4.3.	MATRIK PROGRAM KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN 2007 - 2011	61
<b>BAB V</b>	<b>PELAKSANAAN</b>	<b>72</b>
5.1.	Optimalisasi Fungsi Koordinasi TKPK Kota Yogyakarta.	72
5.2.	Membangun Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.	72
5.2.1	Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Keluarga.	72
5.2.2.	Penyediaan Layanan Pendidikan.	73
5.2.3.	Penyediaan Layanan Kesehatan.	74
5.2.4.	Penyediaan Layanan Jaminan Ketersediaan Pangan.	74
5.2.5.	Penyediaan Keterpenuhan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni.	75
5.2.6.	Penyediaan Keterpenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Yang Baik.	75
5.2.7.	Penguatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin.	76
5.2.8.	Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui Panti Sosial.	76
5.3	Pelaksanaan	77
5.3.1	Sinergi Program Instansi dan Institusi Dalam Penanggulangan Kemiskinan	77
5.3.2.	Kelembagaan	82
5.3.2.	Pendanaan	83
5.3.3.	Indikator	83
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>84</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2007-2011 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta yang saling terkait dan tak terpisahkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Lebih jauh Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran merupakan acuan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pemahaman terhadap fenomena permasalahan, pola dan profil kemiskinan dan pengangguran serta penyebab dan faktor-faktor lain yang berpengaruh sangat diperlukan dalam perumusan strategi intervensi prioritas program dan penetapan jenis kegiatan serta alokasi sumber yang diperlukan. Hal ini sangat penting karena bagi Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersinggungan langsung dengan masyarakat memerlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat intervensi untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan. Upaya-upaya intervensi tersebut menuntut adanya ketersediaan referensi dan petunjuk detail tentang langkah-langkah dan kondisi serta potensi dari permasalahan kemiskinan dan juga pengangguran.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diperlukan kebersamaan dari para pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dijalankan bersifat terpadu dan terkoordinasi dalam bentuk usaha yang komprehensif dan saling bersinergi.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah :

Maksud :

Maksud penetapan RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2007-2011 ditetapkan dengan maksud sebagai acuan atau pedoman dalam sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, pencapaian sasaran dari hasil yang ditetapkan bersama seluruh pihak yang terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Tujuan :

Tujuan dari Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah :

- a. Memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran;
- b. Mengurangi jumlah penduduk miskin;
- c. Mengurangi tingkat pengangguran;
- d. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata;
- e. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
- f. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun bagi penduduk miskin;
- g. Mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat dan sumber daya manusia yang kualitas;
- h. Menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas.

### **1.3. Lingkup RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

Lingkup RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- Diagnosis kemiskinan dengan memperhatikan suara masyarakat miskin,
- Strategi dan rencana aksi yang memuat strategi, prioritas kebijakan dan langkah kebijakan termasuk sasaran dan indikator kinerja, tatacara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan, dan pengangguran,
- Pembagian peran yang jelas antar pelaku baik, pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi profesi, dan lembaga internasional.

Adapun sistematika RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 meliputi:

Bab I       Pendahuluan menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, lingkup serta proses penyusunan dan sistematika.

Bab II       Kondisi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Yogyakarta menguraikan diagnosis kemiskinan dan pengangguran yang memuat gambaran umum dan permasalahan utama kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta. Sumber data dan informasi yang digunakan meliputi hasil analisis kemiskinan partisipatif (PPA), hasil analisis statistik, dan hasil kajian/penelitian.



- Bab III Landasan Pelaksanaan menegaskan landasan konstitusi penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran.
- Bab IV Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Membahas hasil kaji ulang berbagai kebijakan publik yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebijakan publik yang secara tidak langsung berdampak terhadap masyarakat miskin. Dari hasil kaji ulang tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rekomendasi kebijakan.
- Bab V Pelaksanaan menguraikan mekanisme pelaksanaan strategi dan kebijakan yang memuat prasyarat, kelembagaan, jaringan kerja pelaksana, penganggaran, pengendalian dan pengawasan (*safeguarding*), dan antisipasi terhadap hambatan pelaksanaan strategi dan kebijakan menjelaskan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- Bab VI Penutup.

## **BAB II**

### **KONDISI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA YOGYAKARTA**

#### **2.1. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengangguran Secara Konseptual**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah yang saling terkait. Pengangguran merupakan salah satu pemicu dari terjadinya kemiskinan dilain kutub penangguran sangat mungkin disebabkan oleh kondisi miskin. Penyebab kemiskinan sendiri sangat bervariasi dimana antara lain disebabkan oleh karena faktor lingkungan, sosiokultural, ekonomi, politik, kebijakan publik dan sebagainya.

Secara kewilayahan, kondisi dan permasalahan kemiskinan tidak bisa digeneralisasikan untuk semua wilayah. Pendekatan obyektif yang sering dipakai untuk mendasari pengelompokan penduduk miskin dengan pendekatan garis kebutuhan minimum manusia memberikan kondisi kemiskinan yang benar-benar fakir. Tanpa bisa melihat adanya potensi-potensi internal yang bisa dioptimalkan dalam penanganan kemiskinan tersebut.

Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara lain:

- 1). Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada dimasyarakat sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat;
- 2). Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilai-nilai yang tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk; dan
- 3). Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian daerah.

Namun demikian pendekatan yang dipakai dalam menelaah permasalahan kemiskinan sekarang ini lebih mendudukan posisi kelompok miskin itu sendiri sebagai center subject. Konsep-konsep untuk penanganan masalah kemiskinan mulai menggeser pola yang pada awalnya lebih pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan minimum menjadi pendekatan yang lebih memanusiakan. Secara umum kemiskinan sekarang dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis

hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Fenomena kemiskinan dan pengangguran di Indonesia termasuk Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata seiring dengan perkembangan kota memiliki daya tarik yang kuat terhadap urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Keberagaman budaya masyarakat yang menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda secara sosial maupun antara laki-laki dan perempuan.

Secara spesifik beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor intern dan eksteren yaitu :

Faktor Intern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain;

- Rendahnya kualitas mental atau budaya dimana memandang kemiskinan sebagai nasib yang harus diterima (sikap nrimo) dan sikap masa bodoh yaitu sikap pasrah, sehingga tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai gairah, dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka yang dianggap buruk.
- Sumber daya manusia yang terbatas atau kurang memadainya pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan baik dalam kualitas maupun jenis.
- Kerentanan sehingga keluarga miskin terpaksa harus melepaskan aset-aset miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Ketidak-berdayaan (*powerless*) masyarakat miskin dalam hal ketidakmampuan bersaing dengan masyarakat pada umumnya.

Faktor Ekstern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain;

- Ketidak merataan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, yang tidak terbatas pada modal produktif atau aset (tanah, perumahan, kesehatan dan lain-lain), tetapi juga meliputi sumber-sumber keuangan (penghasilan dan kredit). Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang

memadai, serta informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

- Keterbatasan informasi, ketidak terjangkau komunikasi ,menyebabkan tidak terjangkauanya pelayanan dan bantuan dari lembaga pemberi bantuan.
- Lingkungan sosial budaya yang mengakibatkan kurang tingginya hasrat untuk lebih maju dalam kehidupan duniawi.
- Adanya kebijakan publik yang bias pihak dan mengorbankan posisi rakyat sebagai implikasi pembangunan.

## **2.2. Faktor Penyebab Pengangguran Secara Konseptual**

Secara teoritis pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang ingin bekerja tidak dapat pekerjaan . Ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar kerja. Pasar kerja merupakan interaksi antara supply (penawaran) dan demand (permintaan) tenaga kerja. Tiga hal yang mempengaruhi pasar tenaga kerja adalah :

### *1. Belum optimalnya Informasi Tenaga Kerja (distorsi informasi).*

Ketersediaan informasi tenaga kerja akan cukup berpengaruh terhadap munculnya pengangguran. Jika informasi tenaga kerja tersedia dan akurat maka pencari tenaga bekerja maupun pencari kerja akan bertemu sehingga secara teori pasar dalam kondisi equilibrium atau tidak ada pengangguran. Dalam kenyataannya informasi tenaga kerja dapat muncul secara alami ( dari mulut ke mulut) atau melalui media informasi. Kebijakan pemerintah dengan ikut campur tangan dalam penyediaan informasi tenaga kerja akan besar pengaruhnya dalam upaya mengurangi pengangguran.

### *2. Ketidak sesuaian Permintaan dan Penawaran*

- a. Ketidak sesuaian kuantitas terjadi apabila jumlah pencari kerja lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan karena oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan usaha yang dipengaruhi oleh peluang usaha atau iklim usaha.
- b. Ketidak sesuaian kualitas terjadi apabila kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan pencari kerja tidak terpenuhi oleh pencari kerja. Dua hal yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja adalah mutu pendidikan, kemampuan (skill) dan teknologi. Jenis dan tingkat teknologi yang dimiliki suatu usaha akan mempengaruhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Ketika kedua hal tersebut tidak sesuai maka yang terjadi adalah munculnya pengangguran.

Dua aspek lain yang mempengaruhi ketidak sesuaian kualitas adalah produktivitas dan upah.

### 3. *Hubungan Industrial.*

Hubungan industrial tidak hanya menempatkan pengusaha atau perusahaan sebagai pihak yang selalu bersikap tidak fair tetapi juga bisa berangkat dari sikap pekerja atau serikat yang selalu menempatkan diri sebagai pihak yang berlawanan kepada perusahaan atau pengusaha. Baik tidaknya hubungan kerja akan berpengaruh terhadap penyelesaian masalah yang mungkin terjadi antara perusahaan dan karyawan yang akhirnya selalu bermuara pada PHK dan tuntutan pekerja. Kondisi membawa implikasi usaha yang tidak sehat dan sulit berkembang sedangkan industri atau perusahaan merupakan lokomotif penyerap suplay tenaga kerja.

## **2.3. Profil Kemiskinan Kota Yogyakarta**

Uraian tentang potret kemiskinan dan pengangguran dimaksudkan untuk memberikan gambaran kondisi kemiskinan dan pengangguran serta kemungkinan atau hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan dan pengangguran yang nantinya diharapkan sebagai langkah awal untuk menentukan bentuk kebijakan/program yang tepat serta penyusunan rencana aksi (*action plan*) agar penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dapat dilaksanakan dengan tepat di tingkat pelaksanaan kegiatannya.

Untuk mengidentifikasi kemiskinan selama ini yang sering digunakan adalah garis kemiskinan (*poverty line*), yaitu suatu tolok ukur yang menunjukkan ketidakmampuan penduduk melampaui ukuran garis kemiskinan atau suatu ukuran yang didasarkan pada kebutuhan atau pengeluaran konsumsi minimum, misalnya konsumsi pangan dan konsumsi non-pangan (misalnya kebutuhan perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang lain dan jasa).

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan telah mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 470/KEP/2007 tentang perubahan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227 Tahun 2007 menetapkan parameter keluarga miskin Kota Yogyakarta.

Parameter tersebut diharapkan sebagai pedoman penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan semua instansi di Kota Yogyakarta. Keseragaman dan kesepakatan indikator ini adalah salah satu aspek penting untuk

meminimalkan kesalahan atau bias sasaran. Parameter tersebut merupakan indikator komposit yang tersusun dari sektor fisik, ekonomi, sosial dan lainnya. Masing-masing sektor dikembangkan dalam dimensi dan indikator sehingga mudah pengukurannya.

Indikator tersebut merupakan kombinasi beberapa model penanggulangan kemiskinan yang sudah ada sebelumnya seperti indikator kebutuhan dasar yang dikembangkan BPS, Indikator Keluarga Sejahtera yang dikembangkan oleh BKKBN, dan indikator model pembangunan manusia yang dikembangkan UNDP. Setelah melalui proses diskusi dalam forum koordinasi antar lembaga/instansi tingkat kota oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Yogyakarta, langkah awal adalah mencari persamaan-persamaan konsep dari masing-masing indikator dasar yang dipakai oleh sektoral departemen.

Dari rangkuman berbagai indikator diatas maka dikembangkan parameter kemiskinan yang disepakati secara bersama-sama oleh masing-masing instansi di Kota Yogyakarta untuk selanjutnya diusulkan untuk menjadi Keputusan Daerah yang secara formal menjadi acuan oleh semua pihak sebagai indikator kemiskinan. Adapun rumusan parameter kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 1  
Parameter Keluarga Miskin Kota Yogyakarta

Aspek	Parameter	Bobot
1. Pendapatan dan Asset	1. Pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari Rp.150.000,-	8
	2. Kepala Keluarga tidak bekerja.	5
	3. Keluarga tidak memiliki barang selain tanah yang bernilai lebih dari Rp. 500.000,-	5
	4. Status tempat tinggal bukan milik sendiri.	
	5. Jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari bukan gas.	2
	6. Jenis alat penerangan yang digunakan bukan listrik atau listrik tetapi bukan milik sendiri.	3
		2
2. Pangan	1. Keluarga tidak mampu memberi makan Anggota keluarga 3 kali setiap hari.	12
	2. Keluarga tidak mampu membeli dan menyediakan lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu.	8

Aspek	Parameter	Bobot
3. Sandang	1. Keluarga hanya bisa membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun.	5
4. Papan	1. Luas tempat tinggal rata-rata tiap Anggota keluarga kurang dari 8 meter persegi.	3
	2. Jenis bahan lantai bidang terluas dari tempat tinggal berupa tanah/bambu / kayu kualitas rendah.	3
	3. Jenis bahan dinding bidang terluas dari tempat tinggal berupa bambu/kayu/bahan lain berkualitas rendah/tembok tanpa plester atau diplester kualitas rendah.	4
5. Kesehatan	1. Keluarga tidak mampu mengobati anggota keluarga yang sakit di Puskesmas.	10
	2. Sumber air minum yang digunakan berasal dari sumber air tidak terlindung.	5
	3. Kebiasaan membuang air besar di sungai/MCK umum/Milik tetangga.	5
6. Pendidikan	1. Pendidikan Kepala Keluarga maksimal hanya lulus SD.	5
	2. Terdapat anak usia sekolah yang DO.	10
7. Sosial	1. Keluarga tidak mengikuti aktifitas kegiatan lingkungan sama sekali.	5
STRATIFIKASI MISKIN:		Kode:
1. FakirMiskin / Miskin sekali.	Jumlah Bobot antara 76 – 100	FM
2. Miskin.	Jumlah Bobot antara 51 – 75	M
3. Hampir Miskin	Jumlah Bobot antara 31 – 50	HM
4. Tidak Miskin.	Jumlah Bobot 0 – 30	TM

Sebagaimana sistem pendataan keluarga dan penduduk miskin kota Yogyakarta yang bersifat dinamik dengan periodisasi updating data pada setiap tahunnya, sehingga data temuan pada tahun 2007 adalah data potret kondisi kemiskinan pada tahun yang bersangkutan yang akan dipakai sebagai dasar program tahun 2008. Data tersebut akan dilaksanakan updating secara rutin sampai dengan tahun 2011.

### 2.3.1. Sebaran Keluarga dan Penduduk Miskin Kota Yogyakarta.

Jumlah keluarga dan penduduk miskin di Kota Yogyakarta dilihat berdasarkan wilayah maka terdapat variasi sebaran kemiskinan dan prevalensinya sebagai berikut :

Tabel 2  
Sebaran Keluarga dan Penduduk Miskin Serta Tingkat Prevalensinya

NO	KECAMATAN /KELURAHAN	Jml KK Miskin	Jml KK	Prevalensi %	Jml Pnduduk Miskin	Jmlh Pnduduk	Prevalensi %
<b>1</b>	<b>TEGAL REJO</b>						
	1 KRICAK	1012	3991	25.36	2524	14226	17.74
	2 KARANGWARU	588	3140	18.73	1159	11460	10.11
	3 TEGALREJO	693	2661	26.04	2227	10123	22.00
	4 BENER	373	1395	26.74	1256	4995	25.15
	<b>JUMLAH</b>	<b>2666</b>	<b>11187</b>	<b>23.83</b>	<b>7166</b>	<b>40804</b>	<b>17.56</b>
<b>2</b>	<b>JETIS</b>						
	1 BUMIJO	802	2768	28.97	1794	10729	16.72
	2 COKRODININGRATAN	615	2747	22.39	2098	10536	19.91
	3 GOWONGAN	596	2275	26.20	1185	8808	13.45
	<b>JUMLAH</b>	<b>2013</b>	<b>7790</b>	<b>25.84</b>	<b>5077</b>	<b>30073</b>	<b>16.88</b>
<b>3</b>	<b>GONDOKUSUMAN</b>						
	1 DEMANGAN	404	3084	13.10	1353	11109	12.18
	2 KOTABARU	137	987	13.88	402	4156	9.67
	3 KLITREN	441	3476	12.69	1554	13275	11.71
	4 BACIRO	705	3971	17.75	2393	16103	14.86
	5 TERBAN	572	3495	16.37	1914	12193	15.70
	<b>JUMLAH</b>	<b>2259</b>	<b>15013</b>	<b>15.05</b>	<b>7616</b>	<b>56836</b>	<b>13.40</b>
<b>4</b>	<b>DANUREJAN</b>						
	1 SURYATMAJAN	457	1524	29.99	1502	5671	26.49
	2 TEGAL PANGGUNG	1020	2703	37.74	1769	10549	16.77
	3 BAUSASRAN	320	2370	13.50	1000	9255	10.80
	<b>JUMLAH</b>	<b>1797</b>	<b>6597</b>	<b>27.24</b>	<b>4271</b>	<b>25475</b>	<b>16.77</b>
<b>5</b>	<b>GEDONGTENGEN</b>						
	1 SOSROMENDURAN	546	2725	20.04	1761	10097	17.44
	2 PRINGGOKUSUMAN	1073	4062	26.42	1814	15617	11.62
	<b>JUMLAH</b>	<b>1619</b>	<b>6787</b>	<b>23.85</b>	<b>3575</b>	<b>25714</b>	<b>13.90</b>
<b>6</b>	<b>NGAMPILAN</b>						
	1 NGAMPILAN	668	3286	20.33	1443	12638	11.42
	2 NOTOPRAJAN	655	2461	26.62	1270	9579	13.26
	<b>JUMLAH</b>	<b>1323</b>	<b>5747</b>	<b>23.02</b>	<b>2713</b>	<b>22217</b>	<b>12.21</b>
<b>7</b>	<b>WIROBRAJAN</b>						
	1 PAKUNCEN	838	2982	28.10	2092	11706	17.87
	2 WIROBRAJAN	657	2805	23.42	1362	10969	12.42
	3 PATANGPULUHAN	525	2155	24.36	1744	8309	20.99
	<b>JUMLAH</b>	<b>2020</b>	<b>7942</b>	<b>25.43</b>	<b>5198</b>	<b>30984</b>	<b>16.78</b>
<b>8</b>	<b>MANTRIJERON</b>						
	1 GEDONGKIWO	853	3943	21.63	2015	15371	13.11
	2 SURYODININGRATAN	660	3370	19.58	1224	12598	9.72
	3 MANTRIJERON	506	3075	16.46	1667	11840	14.08
	<b>JUMLAH</b>	<b>2019</b>	<b>10388</b>	<b>19.44</b>	<b>4906</b>	<b>39809</b>	<b>12.32</b>
<b>9</b>	<b>KRATON</b>						
	1 PATEHAN	404	1906	21.20	1302	6884	18.91
	2 PANEMBAHAN	558	2940	18.98	1790	10863	16.48
	3 KADIPATEN	392	2249	17.43	1200	7929	15.13
	<b>JUMLAH</b>	<b>1354</b>	<b>7095</b>	<b>19.08</b>	<b>4292</b>	<b>25676</b>	<b>16.72</b>



NO	KECAMATAN /KELURAHAN	Jml KK Miskin	Jml KK	Prevalensi %	Jml Pnduduk Miskin	Jmlh Pnduduk	Prevalensi %
10	<b>GONDONANAN</b>						
	1 NGUPASAN	343	1860	18.44	1123	7092	15.83
	2 PAWIRODIRJAN	903	2688	33.59	2264	10261	22.06
	<b>JUMLAH</b>	<b>1246</b>	<b>4548</b>	<b>27.40</b>	<b>3387</b>	<b>17353</b>	<b>19.52</b>
11	<b>PAKUALAMAN</b>						
	1 PURWOKINANTI	453	1960	23.11	1569	7415	21.16
	2 GUNUNGKETUR	329	1456	22.60	1097	5207	21.07
	<b>JUMLAH</b>	<b>782</b>	<b>3416</b>	<b>22.89</b>	<b>2666</b>	<b>12622</b>	<b>21.12</b>
12	<b>MERGANGSAN</b>						
	1 KEPARAKAN	696	2888	24.10	1525	11120	13.71
	2 WIROGUNAN	760	3999	19.00	1730	14382	12.03
	3 BRONTOKUSUMAN	665	3172	20.96	2079	11738	17.71
	<b>JUMLAH</b>	<b>2121</b>	<b>10059</b>	<b>21.09</b>	<b>5334</b>	<b>37240</b>	<b>14.32</b>
13	<b>UMBULHARJO</b>						
	1 SEMAKI	388	1608	24.13	1323	6062	21.82
	2 MUJA MUJU	440	3342	13.17	1514	12400	12.21
	3 TAHUNAN	442	2662	16.60	1545	10080	15.33
	4 WARUNGBOTO	305	2893	10.54	937	10453	8.96
	5 PANDEAN	569	3784	15.04	1982	12616	15.71
	6 SOROSUTAN	862	4137	20.84	1993	14575	13.67
	7 GIWANGAN	480	1694	28.34	1561	6386	24.44
	<b>JUMLAH</b>	<b>3486</b>	<b>20120</b>	<b>17.33</b>	<b>10855</b>	<b>72572</b>	<b>14.96</b>
14	<b>KOTAGEDE</b>						
	1 REJOWINANGUN	529	3034	17.44	962	11755	8.18
	2 PRENGGAN	716	3240	22.10	1461	11566	12.63
	3 PURBAYAN	735	2699	27.23	2339	9752	23.98
	<b>JUMLAH</b>	<b>1980</b>	<b>8973</b>	<b>22.07</b>	<b>4762</b>	<b>33073</b>	<b>14.40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26685</b>	<b>125662</b>	<b>21.24</b>	<b>89818</b>	<b>470448</b>	<b>19.09</b>

### 2.3.2. Diskripsi Data Keluarga dan Penduduk Miskin Beserta Permasalahannya Basis Wilayah Kecamatan.

#### 1. Kecamatan Tegalrejo

##### a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Kricak	242	560	2120	502
2. Karangwaru	155	360	1256	288
3. Tegalrejo	173	365	1316	373
4. Bener	93	218	720	225
<b>J U M L A H</b>	<b>663</b>	<b>1503</b>	<b>5412</b>	<b>1388</b>

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Kricak					
Laki-laki	82	77	33	47	149
Perempuan	228	35	61	1	90
2. Karangwaru					
Laki-laki	61	55	24	18	115
Perempuan	120	28	47	1	86
3. Tegalrejo					
Laki-laki	76	54	26	36	152
Perempuan	222	44	22	2	62
4. Bener					
Laki-laki	43	23	13	16	71
Perempuan	87	24	16	1	63
JUMLAH L	262	209	96	117	487
JUMLAH P	657	131	146	5	301

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Kricak					
Laki-laki	137	98	51	40	177
Perempuan	265	41	57	2	136
2. Karangwaru					
Laki-laki	71	35	25	16	144
Perempuan	132	25	32	0	92
3. Tegalrejo					
Laki-laki	73	44	8	13	82
Perempuan	160	28	15	1	64
4. Bener					
Laki-laki	56	24	7	13	46
Perempuan	84	16	16	0	32
J U M L A H L	337	201	91	82	419
P	641	110	120	3	324

3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Kricak					
Laki-laki	32	13	3	2	24
Perempuan	29	7	10	0	15
2. Karangwaru					
Laki-laki	11	1	1	1	5
Perempuan	9	4	3	0	3
3. Tegalrejo					
Laki-laki	9	1	1	1	8
Perempuan	14	1	3	1	1
4. Bener					
Laki-laki	3	5	1	0	3
Perempuan	7	4	0	0	5
J U M L A H L	55	20	6	4	40
P	59	16	16	1	24

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Kricak	60	344	165	116	16
2. Karangwaru	61	231	100	87	14
3. Tegalrejo	47	240	89	58	13
4. Bener	36	123	57	29	5
<b>J U M L A H</b>	204	938	411	290	48

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Kricak	60	344	165	116	16
2. Karangwaru	61	231	100	87	14
3. Tegalrejo	47	240	89	58	13
4. Bener	36	123	57	29	5
<b>J U M L A H</b>	204	938	411	290	48

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Orang Sakit	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Kricak	37	21	6	12
2. Karangwaru	52	12	2	3
3. Tegalrejo	66	14	9	6
4. Bener	21	3	4	1
<b>J U M L A H</b>	176	50	21	22

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Kricak	484	787	604
2. Karangwaru	213	443	323
3. Tegalrejo	250	480	321
4. Bener	132	253	186
<b>J U M L A H</b>	1079	1963	1434

2. Kecamatan Jetis

a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Bumijo	201	487	1651	355
2. Cokrodingratan	149	322	1313	314
3. Gowongan	125	308	1312	340
<b>J U M L A H</b>	475	1117	4276	1009

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Bumijo					
Laki-Laki	88	34	23	28	143
Perempuan	193	32	55	1	77
2. Cokrodiningratan					
Laki-Laki	84	48	21	25	132
Perempuan	179	23	31	0	75
3. Gowongan					
Laki-Laki	61	28	25	15	88
Perempuan	136	24	27	0	47
J U M L A H L	233	110	69	68	363
P	508	79	113	1	199

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Bumijo					
Laki-Laki	111	23	42	45	171
Perempuan	255	16	44	0	86
2. Cokrodiningratan					
Laki-Laki	96	29	20	16	100
Perempuan	169	24	19	1	70
3. Gowongan					
Laki-Laki	140	30	33	25	114
Perempuan	195	30	24	1	62
J U M L A H L	347	82	95	86	385
P	619	70	87	2	218

3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Bumijo					
Laki-Laki	15	0	6	1	5
Perempuan	15	0	3	0	2
2. Cokrodiningratan					
Laki-Laki	10	3	1	1	8
Perempuan	9	2	1	0	10
3. Gowongan					
Laki-Laki	23	4	1	5	16
Perempuan	30	3	2	0	12
J U M L A H L	48	7	8	7	29
P	54	5	6	0	24

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Bumijo	65	286	142	105	10
2. Cokrodiningratan	44	204	98	75	6
3. Gowongan	39	178	92	76	14
J U M L A H	148	668	332	256	30

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Bumijo	40	56	61	49	105
2. Cokrodingratan	24	30	37	32	57
3. Gowongan	37	39	26	31	79
<b>J U M L A H</b>	101	125	124	112	241

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Orang Sakit	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Bumijo	38	14	19	4
2. Cokrodingratan	88	9	5	2
3. Gowongan	86	5	4	4
<b>J U M L A H</b>	212	28	28	10

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Bumijo	296	594	607
2. Cokrodingratan	234	461	297
3. Gowongan	233	482	432
<b>J U M L A H</b>	763	1537	1336

3. Kecamatan Gondokusuman

a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Demangan	123	220	859	151
2. Kotabaru	30	68	227	77
3. Klitren	122	260	992	180
4. Baciro	194	387	1457	355
5. Terban	145	316	1194	259
<b>J U M L A H</b>	614	1251	4729	1022

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Demangan					
Laki-Laki	51	28	11	8	105
Perempuan	134	17	31	2	42
2. Kotabaru					
Laki-Laki	3	12	1	1	14
Perempuan	22	5	1	0	5
3. Klitren					
Laki-Laki	69	48	31	1	103
Perempuan	143	24	41	1	62
4. Baciro					
Laki-Laki	91	50	33	24	139
Perempuan	176	46	44	0	101
5. Terban					
Laki-Laki	47	24	25	18	108

Perempuan	113	27	30	4	61
J U M L A H L P	261 588	162 119	101 147	70 7	469 271

## 2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Demangan					
Laki-Laki	48	17	9	12	58
Perempuan	106	8	15	2	45
2. Kotabaru					
Laki-Laki	31	9	4	5	22
Perempuan	44	5	6	1	10
3. Klitren					
Laki-Laki	54	40	16	8	46
Perempuan	105	24	13	2	32
4. Baciro					
Laki-Laki	100	36	22	14	107
Perempuan	128	24	16	0	74
5. Terban					
Laki-Laki	61	27	24	13	89
Perempuan	117	23	29	3	63
J U M L A H L P	294 500	129 84	75 79	52 8	322 224

## 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Demangan					
Laki-Laki	1	0	0	2	1
Perempuan	3	0	0	0	1
2. Kotabaru					
Laki-Laki	3	0	0	1	2
Perempuan	7	0	0	0	1
3. Klitren					
Laki-Laki	0	0	0	1	1
Perempuan	2	0	0	0	0
4. Baciro					
Laki-Laki	12	4	0	3	1
Perempuan	10	4	0	0	3
5. Terban					
Laki-Laki	10	3	2	1	15
Perempuan	22	1	4	0	6
J U M L A H L P	26 44	7 5	2 4	8 0	20 11

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Demangan	40	126	73	74	11
2. Kotabaru	13	40	18	5	2
3. Klitren	43	157	89	68	10
4. Baciro	67	262	122	129	15
5. Terban	48	232	123	130	27
<b>J U M L A H</b>	<b>211</b>	<b>817</b>	<b>425</b>	<b>406</b>	<b>65</b>

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Demangan	22	25	28	30	61
2. Kotabaru	5	9	9	5	11
3. Klitren	27	24	30	42	57
4. Baciro	42	39	39	37	85
5. Terban	26	31	31	29	70
<b>J U M L A H</b>	<b>122</b>	<b>128</b>	<b>137</b>	<b>143</b>	<b>284</b>

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Demangan	16	6	3	2
2. Kotabaru	3	2	3	1
3. Klitren	17	5	3	1
4. Baciro	23	12	6	6
5. Terban	36	13	8	1
<b>J U M L A H</b>	<b>95</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>11</b>

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Demangan	131	251	212
2. Kotabaru	49	121	111
3. Klitren	137	302	261
4. Baciro	286	505	264
5. Terban	222	429	347
<b>J U M L A H</b>	<b>825</b>	<b>1608</b>	<b>1195</b>

4. Kecamatan Danurejan

a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Suryatmajan	113	247	937	205
2. Tegalpanggung	270	574	2201	524
3. Bausasran	79	169	577	175
<b>J U M L A H</b>	<b>462</b>	<b>990</b>	<b>3715</b>	<b>904</b>

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Suryatmajan					
Laki-laki	52	55	24	4	65
Perempuan	83	45	29	1	30
2. Tegalpanggung					
Laki-laki	71	86	29	30	112
Perempuan	193	52	40	3	46
3. Bausasran					
Laki-laki	24	16	14	9	50
Perempuan	57	9	15	0	43
J U M L A H L	147	157	67	43	227
P	333	106	84	4	119

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Suryatmajan					
Laki-laki	66	64	14	11	51
Perempuan	115	57	22	0	30
2. Tegalpanggung					
Laki-laki	212	122	61	27	195
Perempuan	373	83	59	2	107
3. Bausasran					
Laki-laki	26	14	7	11	67
Perempuan	71	7	16	1	44
J U M L A H L	304	200	82	49	313
P	559	147	97	3	181

3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Suryatmajan					
Laki-laki	13	1	6	0	5
Perempuan	11	2	3	0	5
2. Tegalpanggung					
Laki-laki	34	7	8	2	16
Perempuan	32	6	5	1	10
3. Bausasran					
Laki-laki	5	1	0	0	1
Perempuan	1	1	1	0	1
J U M L A H L	52	9	14	2	22
P	44	9	10	1	16

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Suryatmajan	34	144	67	57	6
2. Tegalpanggung	67	345	164	138	17
3. Bausasran	26	95	56	52	5
J U M L A H	127	584	287	247	28



2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Suryatmajan	21	26	31	25	49
2. Tegalpanggung	56	63	55	54	108
3. Bausasran	16	15	18	20	31
<b>J U M L A H</b>	93	104	104	99	188

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Suryatmajan	25	6	2	2
2. Tegalpanggung	48	17	9	4
3. Bausasran	25	8	0	8
<b>J U M L A H</b>	90	31	11	14

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Suryatmajan	179	299	329
2. Tegalpanggung	509	876	394
3. Bausasran	136	256	176
<b>J U M L A H</b>	824	1431	899

5. Kecamatan Gedong Tengen

a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia ( > 55 Th )
1. Sosromenduran	111	260	1090	300
2. Pringgokusuman	283	618	2118	595
<b>J U M L A H</b>	394	878	3208	895

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Sosromenduran					
Laki-laki	80	54	42	19	42
Perempuan	136	26	36	0	28
2. Pringgokusuman					
Laki-laki	97	40	44	124	160
Perempuan	192	43	50	0	97
<b>J U M L A H L</b>	177	94	86	43	202
<b>P</b>	328	69	86	0	125

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Sosromenduran					
Laki-laki	90	37	35	17	39
Perempuan	129	29	33	0	38
2. Pringgokusuman					
Laki-laki	157	64	43	59	206
Perempuan	309	48	68	6	144
<b>J U M L A H L</b>	247	101	78	76	245
<b>P</b>	438	77	101	6	182

### 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Sosromenduran					
Laki-laki	23	3	4	0	7
Perempuan	29	5	5	0	1
2. Pringgokusuman					
Laki-laki	22	3	0	6	20
Perempuan	21	0	4	0	17
J U M L A H L	45	6	4	6	27
P	50	5	9	0	18

### c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

#### 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Sosromenduran	31	171	74	75	9
2. Pringgokusuman	104	378	164	124	12
J U M L A H	135	549	238	199	21

#### 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Sosromenduran	17	28	27	32	60
2. Pringgokusuman	63	54	66	64	105
J U M L A H	80	82	93	96	165

### d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Sosromenduran	35	12	8	8
2. Pringgokusuman	35	5	7	2
J U M L A H	70	17	15	10

### e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Sosromenduran	240	435	346
2. Pringgokusuman	602	953	800
J U M L A H	842	1388	1146

## 6. Kecamatan Ngampilan

### a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Ngampilan	176	373	1418	376
2. Notoprajan	154	351	1326	339
J U M L A H	330	724	2744	715

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Ngampilan					
Laki-Laki	95	62	36	19	126
Perempuan	175	47	49	1	74
2. Notoprajan					
Laki-Laki	68	30	29	21	143
Perempuan	140	15	50	1	86
J U M L A H L	163	92	65	40	269
P	315	62	99	2	160

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Ngampilan					
Laki-Laki	75	59	39	14	97
Perempuan	136	43	54	0	63
2. Notoprajan					
Laki-Laki	95	29	19	21	137
Perempuan	121	23	54	1	87
J U M L A H L	170	88	58	35	234
P	257	66	108	1	150

3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Ngampilan					
Laki-Laki	6	0	2	0	2
Perempuan	6	1	4	0	1
2. Notoprajan					
Laki-Laki	5	1	0	0	4
Perempuan	3	1	0		3
J U M L A H L	11	1	2	1	6
P	9	2	4	0	4

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Ngampilan	40	235	109	97	14
2. Notoprajan	33	219	110	89	19
J U M L A H	73	454	219	186	33

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Ngampilan	41	41	46	53	83
2. Notoprajan	33	35	35	40	78
J U M L A H	74	76	81	93	161

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Ngampilan	53	15	1	1
2. Notoprajan	127	7	1	0
<b>J U M L A H</b>	180	22	2	1

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Ngampilan	304	559	414
2. Notoprajan	193	496	307
<b>J U M L A H</b>	497	1055	721

7. Kecamatan Wirobrajan

a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 T)	Lansia (> 55 Th)
1. Pakuncen	229	517	1814	432
2. Wirobrajan	175	406	1336	345
3. Patangpuluhan	126	299	1083	236
<b>J U M L A H</b>	530	1222	4233	1013

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Pakuncen					
Laki-Laki	73	54	39	23	130
Perempuan	200	28	46	4	67
2. Wirobrajan					
Laki-Laki	57	51	38	18	110
Perempuan	158	38	37	3	70
3. Patangpuluhan					
Laki-Laki	51	72	34	6	91
Perempuan	123	33	36	2	65
<b>J U M L A H L</b>	181	177	111	47	331
<b>P</b>	481	99	119	9	202

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Pakuncen					
Laki-Laki	142	67	30	26	168
Perempuan	250	47	42	1	96
2. Wirobrajan					
Laki-Laki	97	32	23	18	106
Perempuan	147	20	26	2	82
3. Patangpuluhan					
Laki-Laki	49	43	22	13	90
Perempuan	106	18	32	0	73
<b>J U M L A H L</b>	288	142	75	57	364
<b>P</b>	503	85	100	3	251

### 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Pakuncen					
Laki-Laki	21	14	1	3	20
Perempuan	46	5	5	0	14
2. Wirobrajan					
Laki-Laki	8	5	1	6	6
Perempuan	10	3	3	2	4
3. Patangpuluhan					
Laki-Laki	6	0	1	1	5
Perempuan	12	0	0	0	2
J U M L A H L	35	19	3	10	31
P	68	8	8	2	20

#### c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

##### 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Pakuncen	72	320	141	93	15
2. Wirobrajan	68	261	121	101	15
3. Patangpuluhan	43	179	84	73	11
J U M L A H	183	760	346	267	41

##### 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Pakuncen	40	49	53	50	87
2. Wirobrajan	40	50	37	37	85
3. Patangpuluhan	25	32	25	29	58
J U M L A H	105	131	115	116	230

#### d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Pakuncen	108	7	11	2
2. Wirobrajan	21	12	3	2
3. Patangpuluhan	28	11	3	2
J U M L A H	157	30	17	6

#### e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Pakuncen	373	696	433
2. Wirobrajan	234	494	322
3. Patangpuluhan	216	382	339
J U M L A H	823	1572	1094

## 8. Kecamatan Mantrijeron

### a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Gredongkiwo	217	524	1735	439
2. Suryodiningratan	154	368	1223	379
3. Mantrijeron	118	264	988	297
<b>J U M L A H</b>	489	1156	3946	1115

### b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

#### 1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Gredongkiwo					
Laki-Laki	71	88	25	24	161
Perempuan	209	62	50	1	94
2. Suryodiningratan					
Laki-Laki	60	30	18	16	121
Perempuan	130	23	20	1	81
3. Mantrijeron					
Laki-Laki	46	49	26	14	91
Perempuan	104	42	34	0	66
<b>J U M L A H L</b>	177	167	69	54	373
<b>          P</b>	443	127	104	2	241

#### 2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Gredongkiwo					
Laki-Laki	115	51	22	30	145
Perempuan	212	44	39	0	79
2. Suryodiningratan					
Laki-Laki	83	23	25	16	120
Perempuan	136	28	13	0	73
3. Mantrijeron					
Laki-Laki	59	31	17	13	63
Perempuan	100	23	17	0	51
<b>J U M L A H L</b>	257	105	64	59	328
<b>          P</b>	448	95	69	1	203

#### 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Gredongkiwo					
Laki-Laki	24	5	7	2	5
Perempuan	11	8	3	0	6
2. Suryodiningratan					
Laki-Laki	15	5	2	3	10
Perempuan	16	9	0	0	12
3. Mantrijeron					
Laki-Laki	10	2	1	3	7
Perempuan	12	6	2	0	4
<b>J U M L A H L</b>	49	12	10	8	22
<b>          P</b>	39	23	5	0	22

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Gredongkiwo	62	330	139	102	11
2. Suryodiningratan	64	244	111	88	13
3. Mantrijeron	40	161	83	58	13
<b>J U M L A H</b>	166	735	333	248	37

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Gredongkiwo	56	53	55	54	88
2. Suryodiningratan	25	42	34	38	82
3. Mantrijeron	31	25	30	40	44
<b>J U M L A H</b>	112	120	119	132	214

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Gredongkiwo	50	12	12	6
2. Suryodiningratan	30	7	11	3
3. Mantrijeron	31	3	1	0
<b>J U M L A H</b>	111	22	24	9

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Gredongkiwo	327	567	441
2. Suryodiningratan	246	478	371
3. Mantrijeron	199	338	258
<b>J U M L A H</b>	772	1383	1070

9. Kecamatan Kraton

a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Patehan	88	215	781	218
2. Panembahan	127	308	1035	320
3. Kadipaten	63	210	724	203
<b>J U M L A H</b>	278	733	2540	741

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Patehan					
Laki-Laki	33	22	19	11	91
Perempuan	66	28	29	1	55
2. Panembahan					
Laki-Laki	55	52	18	16	91

Perempuan	137	40	40	1	54
3. Kadipaten					
Laki-Laki	41	30	22	10	39
Perempuan	68	25	20	1	30
J U M L A H L	129	104	59	37	221
P	271	93	89	3	139

## 2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Patehan					
Laki-Laki	34	22	18	4	78
Perempuan	94	9	27	4	42
2. Panembahan					
Laki-Laki	65	32	18	16	74
Perempuan	109	17	18	0	66
3. Kadipaten					
Laki-Laki	52	27	27	12	52
Perempuan	94	15	22	0	38
J U M L A H L	151	81	63	32	204
P	297	41	67	4	146

## 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Patehan					
Laki-Laki	1	0	1	1	4
Perempuan	2	0	3	0	3
2. Panembahan					
Laki-Laki	12	3	1	0	6
Perempuan	11	2	2	0	3
3. Kadipaten					
Laki-Laki	1	0	1	0	3
Perempuan	3	1	0	0	2
J U M L A H L	14	3	3	1	13
P	16	3	5	0	8

### c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

#### 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Patehan	17	125	68	53	11
2. Panembahan	34	191	89	55	11
3. Kadipaten	25	142	66	63	8
J U M L A H	76	458	223	171	30

#### 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Patehan	20	25	21	23	44
2. Panembahan	31	26	35	32	42
3. Kadipaten	10	16	34	25	38
J U M L A H	61	67	90	80	124



d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Patehan	13	7	1	1
2. Panembahan	11	7	1	2
3. Kadipaten	19	2	0	0
<b>J U M L A H</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Patehan	207	313	238
2. Panembahan	191	403	337
3. Kadipaten	136	297	250
<b>J U M L A H</b>	<b>534</b>	<b>1013</b>	<b>825</b>

10. Kecamatan Gondomanan

a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Ngupasan	73	170	679	201
2. Prawirodirjan	227	463	1944	530
<b>J U M L A H</b>	<b>300</b>	<b>633</b>	<b>2623</b>	<b>731</b>

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Ngupasan					
Laki-Laki	50	33	20	6	58
Perempuan	88	22	29	0	28
2. Prawirodirjan					
Laki-Laki	106	59	43	27	109
Perempuan	241	41	47	0	28
<b>J U M L A H L</b>	<b>156</b>	<b>92</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>167</b>
<b>P</b>	<b>329</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Ngupasan					
Laki-Laki	28	27	12	4	36
Perempuan	58	25	13	0	23
2. Prawirodirjan					
Laki-Laki	177	74	62	30	130
Perempuan	283	42	48	0	88
<b>J U M L A H L</b>	<b>205</b>	<b>101</b>	<b>74</b>	<b>34</b>	<b>166</b>
<b>P</b>	<b>341</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>111</b>

### 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Ngupasan					
Laki-Laki	1	1	0	0	1
Perempuan	4	0	0	0	0
2. Prawirodirjan					
Laki-Laki	37	12	3	9	21
Perempuan	56	9	2	0	2
J U M L A H	36	13	3	9	22
L					
P	60	9	2	0	2

### c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

#### 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Ngupasan	29	143	71	62	10
2. Prawirodirjan	55	269	110	86	12
J U M L A H	84	412	181	148	22

#### 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Ngupasan	11	18	15	19	38
2. Prawirodirjan	46	52	48	32	88
J U M L A H	57	70	63	51	126

### d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Ngupasan	15	5	1	0
2. Prawirodirjan	23	13	21	1
J U M L A H	38	18	22	1

### e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Ngupasan	128	249	177
2. Prawirodirjan	249	665	645
J U M L A H	377	914	822

## 11. Kecamatan Pakualaman

### a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Purwokinanti	89	260	969	251
2. Gunungketur	68	192	684	153
J U M L A H	157	452	1653	404

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Purwokinanti					
Laki-Laki	45	34	13	11	86
Perempuan	114	27	17	0	42
2. Gunungketur					
Laki-Laki	30	29	11	8	65
Perempuan	61	28	18	0	43
J U M L A H L	75	63	24	19	151
P	175	55	35	0	85

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Purwokinanti					
Laki-Laki	79	30	17	8	75
Perempuan	126	25	20	1	57
2. Gunungketur					
Laki-Laki	32	18	12	18	60
Perempuan	77	25	16	0	47
J U M L A H L	111	48	29	26	135
P	203	50	36	1	104

3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Purwokinanti					
Laki-Laki	20	4	2	1	10
Perempuan	18	0	3	0	5
2. Gunungketur					
Laki-Laki	7	5	3	2	4
Perempuan	8	1	0	1	5
J U M L A H L	27	9	5	3	14
P	26	1	3	1	10

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Purwokinanti	44	159	76	48	8
2. Gunungketur	21	122	57	37	3
J U M L A H	65	281	133	85	11

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Purwokinanti	8	22	25	23	55
2. Gunungketur	10	22	19	20	31
J U M L A H	28	44	44	43	86

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Purwokinanti	37	5	6	1
2. Gunungketur	23	4	14	0
<b>J U M L A H</b>	60	9	20	1

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Purwokinanti	229	384	270
2. Gunungketur	136	261	168
<b>J U M L A H</b>	365	645	438

12. Kecamatan Mergangsan

a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Keparakan	195	402	1474	354
2. Wirogunan	189	410	1613	418
3. Brontokusuman	166	315	1216	382
<b>J U M L A H</b>	550	1127	4303	1154

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

1) Hampir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Keparakan					
Laki-Laki	60	100	22	18	86
Perempuan	145	56	40	0	51
2. Wirogunan					
Laki-Laki	69	100	28	17	73
Perempuan	199	41	27	2	46
3. Brontokusuman					
Laki-Laki	80	67	33	24	86
Perempuan	188	29	48	0	72
<b>J U M L A H L</b>	209	267	83	59	245
<b>          P</b>	532	126	115	2	169

2) Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Keparakan					
Laki-Laki	123	64	28	23	109
Perempuan	179	50	45	0	67
2. Wirogunan					
Laki-Laki	128	78	35	15	137
Perempuan	279	41	22	1	69
3. Brontokusuman					
Laki-Laki	75	45	19	20	80
Perempuan	117	27	22	2	55
<b>J U M L A H L</b>	326	187	82	58	326
<b>          P</b>	575	118	89	3	191

### 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Keparakan					
Laki-Laki	24	4	0	4	6
Perempuan	20	2	5	0	12
2. Wirogunan					
Laki-Laki	20	4	1	4	12
Perempuan	21	3	4	0	6
3. Brontokusuman					
Laki-Laki	6	3	0	1	3
Perempuan	6	0	0	0	0
J U M L A H L	50	11	1	9	21
P	47	5	9	0	18

### c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

#### 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Keparakan	47	261	128	87	12
2. Wirogunan	76	236	107	93	14
3. Brontokusuman	55	179	82	74	13
J U M L A H	178	676	317	254	39

#### 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Keparakan	40	36	49	41	75
2. Wirogunan	38	47	45	44	83
3. Brontokusuman	28	33	33	39	59
J U M L A H	106	116	127	124	217

### d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Keparakan	49	12	6	6
2. Wirogunan	59	5	13	6
3. Brontokusuman	63	8	6	3
J U M L A H	171	25	25	15

### e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Keparakan	278	535	296
2. Wirogunan	336	615	394
3. Brontokusuman	194	380	311
J U M L A H	808	1530	1001

## 13. Kecamatan Umbulharjo

### a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Semaki	109	197	800	217
2. Muja-muju	129	242	914	229
3. Tahunan	130	276	932	207

4. Warungboto	72	160	547	158
5. Pandeyan	148	357	1188	289
6. Sorosutan	192	486	1808	407
7. Giwangan	126	261	934	240
<b>J U M L A H</b>	<b>906</b>	<b>1979</b>	<b>7123</b>	<b>1747</b>

**b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.**

**1) Hampir Miskin**

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Semaki					
Laki-Laki	32	31	19	10	57
Perempuan	88	16	23	2	23
2. Muja-muju					
Laki-Laki	47	47	31	14	81
Perempuan	117	19	30	0	46
3. Tahunan					
Laki-Laki	46	44	24	16	108
Perempuan	122	26	19	2	69
4. Warungboto					
Laki-Laki	27	12	12	6	49
Perempuan	42	12	17	1	36
5. Pandeyan					
Laki-Laki	49	50	16	24	167
Perempuan	153	27	38	1	97
6. Sorosutan					
Laki-Laki	81	148	38	38	122
Perempuan	188	75	45	1	105
7. Giwangan					
Laki-Laki	26	34	21	27	141
Perempuan	114	23	27	4	63
<b>J U M L A H L</b>	<b>308</b>	<b>367</b>	<b>161</b>	<b>135</b>	<b>725</b>
<b>P</b>	<b>824</b>	<b>198</b>	<b>199</b>	<b>11</b>	<b>439</b>

**2) Miskin**

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Semaki					
Laki-Laki	52	23	13	11	81
Perempuan	90	26	21	0	52
2. Muja-muju					
Laki-Laki	63	40	17	8	72
Perempuan	120	18	21	0	43
3. Tahunan					
Laki-Laki	34	21	11	14	70
Perempuan	100	15	14	0	35
4. Warungboto					
Laki-Laki	30	13	7	7	56
Perempuan	40	13	14	4	42
5. Pandeyan					
Laki-Laki	59	25	18	18	96
Perempuan	136	8	22	0	44
6. Sorosutan					
Laki-Laki	98	82	32	29	132
Perempuan	176	45	40	0	105
7. Giwangan					
Laki-Laki	28	16	6	14	92
Perempuan	94	18	22	0	51
<b>J U M L A H L</b>	<b>364</b>	<b>220</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>599</b>
<b>P</b>	<b>756</b>	<b>143</b>	<b>154</b>	<b>4</b>	<b>372</b>

### 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Semaki					
Laki-Laki	4	2	1	0	6
Perempuan	4	1	1	0	5
2. Muja-muju					
Laki-Laki	6	5	0	0	0
Perempuan	3	1	0	0	3
3. Tahunan					
Laki-Laki	4	1	1	0	1
Perempuan	3	1	0	1	1
4. Warungboto					
Laki-Laki	5	0	0	2	12
Perempuan	7	0	3	0	1
5. Pandeyan					
Laki-Laki	7	0	0	1	8
Perempuan	12	0	0	0	6
6. Sorosutan					
Laki-Laki	6	2	1	6	5
Perempuan	7	6	1	0	5
7. Giwangan					
Laki-Laki	3	0	2	0	10
Perempuan	10	0	1	0	6
<b>J U M L A H L</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>42</b>
<b>P</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>27</b>

#### c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

##### 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Semaki	33	159	65	60	7
2. Muja-muju	48	149	66	47	5
3. Tahunan	45	186	91	77	6
4. Warungboto	20	107	45	60	6
5. Pandeyan	32	226	107	63	13
6. Sorosutan	80	306	146	105	19
7. Giwangan	46	143	67	55	12
<b>J U M L A H</b>	<b>304</b>	<b>1276</b>	<b>587</b>	<b>467</b>	<b>68</b>

##### 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Semaki	23	18	13	22	44
2. Muja-muju	23	21	33	22	44
3. Tahunan	31	37	29	31	39
4. Warungboto	10	15	15	19	32
5. Pandeyan	36	41	39	34	70
6. Sorosutan	38	54	49	55	104
7. Giwangan	18	31	29	26	38
<b>J U M L A H</b>	<b>179</b>	<b>217</b>	<b>207</b>	<b>209</b>	<b>371</b>

#### d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan.

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Semaki	24	11	4	4
2. Muja-muju	30	10	8	2
3. Tahunan	27	5	2	3
4. Warungboto	9	3	1	2

5. Pandeyan	24	15	4	2
6. Sorosutan	125	21	7	1
7. Giwangan	14	13	5	1
<b>J U M L A H</b>	<b>253</b>	<b>78</b>	<b>31</b>	<b>15</b>

**e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan.**

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Semaki	174	294	259
2. Muja-muju	163	291	241
3. Tahunan	166	265	190
4. Warungboto	89	167	168
5. Pandeyan	213	409	182
6. Sorosutan	293	527	381
7. Giwangan	172	328	175
<b>J U M L A H</b>	<b>1270</b>	<b>2281</b>	<b>1596</b>

**14. Kecamatan Kotagede**

**a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk.**

Usia Kelurahan	Usia Balita (sd =<5 Th)	Usia Anak (>5 - =<15 Th)	Usia Produktif (>16 - =< 55 Th)	Lansia (> 55 Th)
1. Rejowinangun	135	340	1136	251
2. Prenggan	178	399	1419	365
3. Purbayan	134	375	1396	434
<b>J U M L A H</b>	<b>447</b>	<b>1114</b>	<b>3951</b>	<b>1050</b>

**b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.**

**1) Hampir Miskin**

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Rejowinangun					
Laki-Laki	52	44	22	6	59
Perempuan	120	26	22	0	43
2. Prenggan					
Laki-Laki	57	59	25	29	154
Perempuan	150	40	43	2	126
3. Purbayan					
Laki-Laki	64	108	13	15	185
Perempuan	142	54	45	2	137
<b>J U M L A H L</b>	<b>173</b>	<b>211</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>398</b>
<b>P</b>	<b>412</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>306</b>

**2) Miskin**

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Rejowinangun					
Laki-Laki	79	50	17	13	128
Perempuan	159	33	29	5	72
2. Prenggan					
Laki-Laki	61	51	10	21	138
Perempuan	124	24	22	3	103
3. Purbayan					
Laki-Laki	44	77	8	6	99
Perempuan	119	41	17	0	82
<b>J U M L A H L</b>	<b>184</b>	<b>178</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>365</b>
<b>P</b>	<b>402</b>	<b>98</b>	<b>68</b>	<b>8</b>	<b>257</b>



### 3) Fakir Miskin

Pekerjaan Kelurahan	Tidak Bekerja	Industri	Perdagangan	Angkutan	Jasa
1. Rejowinangun Laki-Laki	12	0	3	0	4
Perempuan	13	4	3	0	7
2. Prenggan Laki-Laki	2	1	1	0	4
Perempuan	5	0	0	0	3
3. Purbayan Laki-Laki	6	5	1	0	1
Perempuan	7	1	3	0	3
J U M L A H L	20	6	5	0	9
P	25	5	6	0	13

#### c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

##### 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Rejowinangun	44	225	102	77	4
2. Prenggan	54	256	133	104	11
3. Purbayan	45	257	99	75	11
J U M L A H	143	738	334	256	26

##### 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin

Pendidikan Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	PT
1. Rejowinangun	23	32	26	28	55
2. Prenggan	34	44	38	47	77
3. Purbayan	21	43	37	37	68
J U M L A H	78	119	101	112	200

#### d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan

Masalah Kesehatan Kelurahan	Sakit Permanen	Ibu Hamil	Balita Rawan Gizi	Balita Gizi Buruk
1. Rejowinangun	30	15	4	3
2. Prenggan	30	6	5	1
3. Purbayan	37	12	11	4
J U M L A H	97	33	20	8

#### e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan

Masalah Perumahan Kelurahan	Lantai Tanah / Tidak Permanen	Dinding Tidak Permanen	Rasio Ruang Kurang Dari 8 m
1. Rejowinangun	236	383	270
2. Prenggan	200	457	284
3. Purbayan	369	532	301
J U M L A H	805	1372	855

### 2.3.3. Deskripsi Keluarga dan Penduduk Miskin dan Permasalahannya Basis Kota Yogyakarta.

#### 2.3.3.1. Permasalahan Kemiskinan dan Kemampuan Pendapatan.

Pendapatan merupakan alat-ukur yang diasumsikan memberikan kontribusi dominan dalam menentukan suatu keluarga dikategorikan miskin atau tidak. Pada

parameter pendapatan ini dapat diturunkan pada asumsi-asumsi keterbatasan potensi ekonomi warga.

Untuk mendetailkan data maka kelompok penduduk miskin dengan pendapatan dibawah Rp. 150.000/bulan/kapita pada tabel berikut :

**Tabel.3.**  
**Kemiskinan dan Tingkat Pendapatan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2007**

Pendapatan Kondisi	Kurang dari Rp. 150.000/bln	%	Lebih dari Rp.150.000/bln	%
Fakir miskin	1.382	6,71	54	0,88
Miskin	11.579	56,26	1.755	28,75
Hampir Miskin	7.621	37,03	4.294	70,37
Jumlah Miskin	20.582	100	6.103	100

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dominan keluarga atau penduduk miskin yakni sebanyak 20.582 keluarga berpendapatan/kapita/bulan dibawah Rp. 150.000. Kondisi ini dari aspek potensi ekonomi atau kemampuan rata-rata penduduk miskin untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok non pangan menjadi sangat rentan.

### **2.3.3.2. Permasalahan Kemiskinan dan Kesempatan Kerja.**

Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin dikota Yogyakarta tidak lepas dari aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh Kepala keluarga atau anggota keluarga yang lain atau bahkan lebih parah adalah disebabkan oleh kondisi kepala keluarga atau anggota keluarga yang tidak bekerja.

Gambaran pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 4 dan 5 sebagai berikut :

**Tabel. 4.**  
**Kemiskinan dan Kepala Keluarga Miskin Bekerja dan Tidak Bekerja Kota Yogyakarta Tahun 2007**

Pekerjaan Kondisi	Tdk Bekerja	%	Bekerja	%
Fakir miskin	838	11,05	598	3,13
Miskin	4.373	57,68	8.961	46,90
Hampir Miskin	2.370	31,26	9.545	49,96
Jumlah Miskin	7.581	100	19.104	100

Kelompok keluarga dengan kategori miskin adalah kelompok terbanyak dilihat dari status kepala keluarga yang tidak bekerja dengan jumlah 4.373 kepala keluarga.

Apabila aktifitas pekerjaan bagi kepala keluarga tersebut dilihat pada tataran anggota keluarga yang sudah berusia produktif dan berstatus tidak sekolah diskripsi kuantitatif keluarga tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 5.  
Angkatan Kerja Penduduk Miskin.  
Kemiskinan dan Pekerjaan

Kondisi \ Pekerjaan	Pekerjaan				
	Tdk Bekerja	Jasa	Industri	Dagang	Angkutan
Jumlah Miskin	3.197	8.449	2.897	2.665	1.540

Tabel diatas memberikan gambaran kondisi angkatan kerja pada kelompok masyarakat miskin. Gambaran tersebut membenarkan asumsi tentang keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga miskin untuk bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.

### 2.3.3.3. Keluarga Miskin dan Kepemilikan Aset Ekonomi.

Kepemilikan aset ekonomi merupakan gambaran kemampuan saving masyarakat miskin. Kemampuan kepemilikan ini secara konseptual akan sangat tergantung pada aktifitas pekerjaan dan tingkat pendapatan. Dalam bentuk hubungan sederhana antara rade keluarga miskin dengan kepemilikan aset dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 6.  
Kemiskinan dan Aset Ekonomi

Aset Kondisi	Tidak Lebih Rp. 500.000		Lebih Rp.500.000	
		%		%
Fakir miskin	1396	6,77	40	0,65
Miskin	11542	56,03	1792	29,44
Hampir Miskin	7661	37,191	4254	69,89
Jumlah Miskin	20599	100	6086	100

Tabel diatas merupakan deskripsi dari keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat miskin.

### 2.3.3.4. Keluarga Miskin dan status Kepemilikan Tempat Tinggal.

Tabel. 7.  
Kemiskinan dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Keluarga Miskin  
Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	Milik Sendiri	%	Bukan Milik Sendiri	%
Fakir miskin	278	3,39	1158	6,25
Miskin	3727	45,57	9607	51,90
Hampir Miskin	4172	51,02	7743	41,83
Jumlah Miskin	8177	100	18508	100

### 2.3.3.5. Keluarga Miskin dengan jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari

Tabel. 8.  
Kemiskinan dengan jenis bahan bakar untuk memasak  
yang digunakan sehari-hari

Aset Kondisi	Memakai Gas/Listrik	%	Tidak Memakai Gas (Kayu/Arang/Minyak Tanah)	%
Fakir miskin	7	1,32	1429	5,46
Miskin	163	30,75	13171	50,35
Hampir Miskin	360	67,92	11555	44,17
Jumlah Miskin	530	100	26155	100

### 2.3.3.6. Keluarga Miskin dengan Jenis alat penerangan yang digunakan

Tabel. 9.  
Kemiskinan dengan Jenis alat penerangan yang digunakan Keluarga Miskin  
Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	Bukan Listrik/ Listrik Milik Orang Lain	%	Listrik Milik Sendiri	%
Fakir miskin	1174	9,18	262	1,88
Miskin	7353	57,54	5981	43,00
Hampir Miskin	4250	33,26	7665	55,11
Jumlah Miskin	12777	100	13908	100

### 2.3.3.7. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Pangan

Tabel. 10.  
Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut kemampuan memberi makan Anggota  
keluarga 3 kali setiap hari Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	Mampu memberi makan Dua Kali atau Kurang setiap hari	%	Mampu memberi makan Lebih dari Dua Kali setiap hari	%
Fakir miskin	1413	8,15	23	0,24
Miskin	11308	65,23	2026	21,66
Hampir Miskin	4614	26,61	7301	78,08
Jumlah Miskin	17335	100	9350	100

Tabel. 11.

Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut kemampuan membeli dan menyediakan lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	1 Kali atau Tidak Pernah Membeli lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu.	%	2 Kali atau Lebih membeli lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu.	%
Fakir miskin	1430	6,02	6	0,20
Miskin	12712	53,52	622	21,19
Hampir Miskin	9609	40,45	2306	78,59
Jumlah Miskin	23751	100	2934	100

### 2.3.3.8. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Sandang

Tabel. 12.

Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut kemampuan membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	1 Stel atau Tidak Pernah Membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun.	%	2 Stel atau Lebih membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun	%
Fakir miskin	1414	5,67	22	1,25
Miskin	12859	51,58	475	27,02
Hampir Miskin	10654	42,74	1261	71,72
Jumlah Miskin	24927	100	1758	100

### 2.3.3.9. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Papan

Tabel. 13.

Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Luas tempat tinggal rata-rata tiap Anggota keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	Kurang 8 Meter Persegi	%	Lebih atau Sama Dengan 8 Meter Persegi	%
Fakir miskin	1029	7,13	407	3,32
Miskin	7919	54,87	5415	44,19
Hampir Miskin	5484	37,99	6431	52,48
Jumlah Miskin	14432	100	12253	100

Tabel. 14.  
Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Jenis bahan lantai bidang terluas dari tempat tinggal di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	Tanah/Bambu/Kayu Kualitas Rendah	%	Semen /Keramik/Kayu kualitas Baik	%
Fakir miskin	1087	10,27	349	2,16
Miskin	6359	60,08	6975	43,32
Hampir Miskin	3138	29,64	8777	54,51
Jumlah Miskin	10584	100	16101	100

Tabel. 15.  
Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Jenis bahan dinding bidang terluas dari tempat tinggal di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	Bambu/Kayu/Bahan Lain Berkualitas Rendah/Tembok Plesteran Kualitas Rendah	%	Tembok/Bahan Lain Berkualitas Tinggi	%
Fakir miskin	1361	6,91	75	1,07
Miskin	10848	55,08	2486	35,54
Hampir Miskin	7483	38	4432	63,37
Jumlah Miskin	19692	100	6993	100

### 2.3.3.10. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Kesehatan

Keluarga tidak mampu mengobati anggota keluarga yang sakit di Puskesmas.

Tabel. 16.  
Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut kemampuan mengobati anggota keluarga yang sakit di Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	Tidak Mampu	%	Mampu	%
Fakir miskin	1302	14,24	134	0,76
Miskin	5621	61,48	7713	43,96
Hampir Miskin	2219	24,27	9696	55,26
Jumlah Miskin	9142	100	17543	100

Tabel. 17.  
Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Sumber air minum yang digunakan berasal dari sumber air di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Aset Kondisi	Sumber Air Tak Terlindungi	%	Pompa/Sumur/Mata Air Terlindungi/Air Kemasan	%
Fakir miskin	581	18,37	855	3,63
Miskin	1847	58,41	11487	48,83
Hampir Miskin	734	23,21	11181	47,53
Jumlah Miskin	3162	100	23523	100

Tabel. 18.  
Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Kebiasaan membuang air besar di sungai/MCK umum/Milik tetangga. di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Kondisi Aset	Sungai/MCK Umum/Milik Tetangga	%	MCK Milik Sendiri	%
Fakir miskin	1137	10,42	299	1,89
Miskin	6477	59,37	6857	43,46
Hampir Miskin	3295	30,20	8620	54,64
Jumlah Miskin	10909	100	15776	100

### 2.3.3.11. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Pendidikan

Tabel. 19.  
Kemiskinan dan Pendidikan Kepala Keluarga maksimal hanya lulus SD.  
. di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Kondisi Aset	Maksimal SD	%	Lebih Dari SD	%
Fakir miskin	1233	8,04	202	1,78
Miskin	8465	55,24	4847	42,79
Hampir Miskin	5626	36,71	6277	55,42
Jumlah Miskin	15324	100	11326	100

Tabel. 20.  
Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Anggota Keluarga Usia Sekolah yang DO di SMA/K atau dibawahnya di Kota Yogyakarta Tahun 2007

Kondisi Aset	Ada	%	Tidak Ada	%
Fakir miskin	686	21,32	750	3,19
Miskin	1853	57,60	11481	48,92
Hampir Miskin	678	21,07	11237	47,88
Jumlah Miskin	3217	100	23468	100

### 2.3.3.12. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Aktifitas Sosial

Keluarga tidak mengikuti aktifitas kegiatan lingkungan sama sekali.

Tabel. 21.  
Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Anggota Keluarga Ikut Dalam Aktifitas Kegiatan Sosial di Lingkungannya Kota Yogyakarta Tahun 2007

Kondisi Aset	Tidak Ikut	%	Ikut 1 Kegiatan atau Lebih	%
Fakir miskin	848	13,29	588	2,89
Miskin	3666	57,47	9668	47,60
Hampir Miskin	1864	29,22	10051	49,49
Jumlah Miskin	6378	100	20307	100

## 2.4. Profil Data Pengangguran Kota Yogyakarta.

Pengertian tentang penganggur sering menjadi rancu bagi pengguna data, beberapa pengertian tentang penganggur antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. Mereka yang terdaftar pada departemen atau dinas yang mengurus tentang daftar pencari kerja atau mereka sebagai pemegang kartu pencari kerja.
- b. Mereka yang sedang berusaha aktif mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, seperti selama seminggu, sebulan, atau satuan waktu lainnya.
- c. Mereka yang sedang bekerja, tetapi masih atau sambil mencari pekerjaan selain yang sedang dikerjakan.
- d. Mereka yang sedang tidak mempunyai pekerjaan karena sesuatu hal dan aktif mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.
- e. Mereka yang tidak bekerja, tidak aktif mencari pekerjaan, tetapi bersedia bekerja apabila diberi pekerjaan.

Ada kesamaan konsep yang dipakai untuk batasan penganggur oleh Departemen Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik: Bahwa penganggur adalah bagian dari angkatan kerja yang kegiatan utamanya ialah sedang aktif mencari pekerjaan. yang disebut aktif mencari pekerjaan diartikan dengan jumlah jam, yaitu minimal satu jam perminggu.

Sedangkan menyangkut Ketenagakerjaan dan pengangguran, distribusi rata-rata presentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja di Kota Yogyakarta cukup rendah yaitu 6,63 persen. Persentase terbesar terdapat di Kecamatan Mantrijeron yaitu sebanyak 14,98 persen.

Dari seluruh angkatan kerja di Kota Yogyakarta rata-rata persentase yang bekerja sebesar 37,18 persen. Persentase tinggi terdapat di Kecamatan Gondomanan, Ngampilan dan Mergangsan dimana lebih dari setengah angkatan kerja yang ada di wilayah tersebut masuk kelompok bekerja.

Tabel. 22.  
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Status Kerja Perkecamatan  
di Kota Yogyakarta Tahun 2006

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja					
		Penganggur	%	Bekerja	%	Jumlah	%
Mantrijeron	41.333	6.190	14.98	16.278	39.38	22.468	54.36
Kraton	29.547	1.281	4.34	12.150	41.12	13.431	45.46
Mergangsan	42.238	3.651	8.64	22.399	53.03	26.050	61.67
Umbulharjo	74.428	3.740	5.02	22.132	29.74	25.872	34.76
Kotagede	32.516	1.026	3.16	14.458	44.46	15.484	47.62
Gondokusuman	74.243	6.305	8.49	27.128	36.54	33.433	45.03
Danurejan	31.634	1.770	5.60	11.318	35.78	13.088	41.37
Pakualaman	14.981	1.343	8.96	5.045	33.68	6.388	42.64
Gondomanan	17.981	287	1.60	10.429	58.00	10.716	59.60



Ngampilan	25.427	1.077	4.24	14.694	57.79	15.771	62.02
Wirobrajan	28.849	1.123	3.89	7.979	27.66	9.102	31.55
Gedongtengen	26.367	1.843	6.99	5.163	19.58	7.006	26.57
Jetis	38.196	2.917	7.64	14.119	36.96	17.036	44.60
Tegalrejo	41.893	1.888	4.51	9.907	23.65	11.795	28.16
Jumlah	519.633	34.441	6.63	193.199	37.18	27.640	43.81

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Yogyakarta

## **BAB. III**

### **LANDASAN PELAKSANAAN**

#### **3.1. Landasan Global.**

3.1.1. Millenium Development Goals (MDGs) merekomendasikan adanya hak-hak dasar manusia yang harus terpenuhi secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hal ini juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai MDG's pada tahun 2015 yaitu:

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan
- 2) Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua
- 3) Mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan
- 4) Mengurangi tingkat kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain
- 7) Menjamin kelestarian lingkungan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

3.1.2 Water World Forum (WWF) Tahun 2000 Tentang Kesepakatan Millenium Development Goals (MDG) 2015 untuk mengurangi sekitar setengah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih.  
Convension of The Rights of The Child (1989), World Declaration on ucation For All (1990) Dakkar Work For Action (2000)

#### **3.2. Landasan Nasional.**

3.2.1. Undang-undang Dasar 1945 terutama pada pasal-pasal :

- 1) Pasal 27 ayat 2 : "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- 2) Pasal 28 H :
  - Ayat 1: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan".
  - Ayat 2 : "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
  - Ayat 3 : "Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"
- 3) Pasal 31 ayat 1 : "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan".

4) Pasal 4 :

- Ayat 1 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
- Ayat 2 : “Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
- Ayat 3 : “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum”.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

3.2.3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009

### **3.3. Landasan Regional**

3.3.1. Kebijakan Pemerintah Propinsi

3.3.2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025

3.3.3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2011.

**BAB IV**  
**RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**  
**DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA**

**4.1. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran berdasar Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta.**

Rencana Aksi Daerah dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran juga berdasarkan pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta yang memuat strategi dan kebijakan sebagai berikut:

**4.1.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

**4.1.1.1. Strategi Perlindungan Sosial**

Strategi perlindungan sosial dimaksudkan untuk menjamin pemberian rasa aman dan perlindungan pada penduduk miskin dan rentan baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain karena dampak negatif krisis ekonomi, peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah dan lain sebagainya..

**Kebijakan**

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka perlindungan sosial kepada masyarakat miskin yaitu :

- a. Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemampuan serta kesempatan penduduk miskin untuk turut serta dalam pembangunan dan menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Peningkatan pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat miskin melalui keterpaduan pemerintah dan masyarakat
- c. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pelayanan bagi kesejahteraan sosial yang didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi serta menumbuhkembangkan kepedulian terhadap kelompok miskin.

**4.1.1.2. Strategi Perluasan Kesempatan**

Strategi ini dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

## **Kebijakan**

### Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar Manusia

- menjamin pemenuhan hak dasar di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

#### **4.1.1.3. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**

Memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan potensinya dan kemampuan berusaha agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

### **Kebijakan:**

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Warga Miskin dalam mengakses sumber daya pembangunan.

- Meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin agar dapat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya bagi perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera
- Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha masyarakat miskin melalui usaha produktif serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKK) yang banyak menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat miskin.

#### **4.1.1.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

### Kebijakan Penguatan Fungsi Kelembagaan

- meningkatkan peran aktif lembaga swadaya masyarakat, organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam mengakomodasi pemberdayaan masyarakat miskin.
- meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan terutama kelompok-kelompok rentan masyarakat miskin
- Selalu mempertimbangkan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam semua pengambilan kebijakan.

#### **4.1.1.5. Strategi Kemitraan**

Mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional dalam upaya penanganan kemiskinan dan pengembangan kesempatan kerja.

#### **Kebijakan**

- Membangun jaringan kerjasama dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja
- Membangun penyediaan informasi dalam rangka peningkatan partisipasi publik pada usaha-usaha penanganan kemiskinan.

#### **4.2. Alur Pola Pikir Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.**

Berangkat dari kompleksitas permasalahan kemiskinan dan pengangguran kota Yogyakarta dan keterbatasan potensi internal dalam permasalahan tersebut serta dengan mendasarkan pada evaluasi-evaluasi dari program-program yang sudah ada maka tahapan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 adalah sebagai berikut :

##### **4.2.1 Validasi dan pelembagaan updating data Keluarga Miskin.**

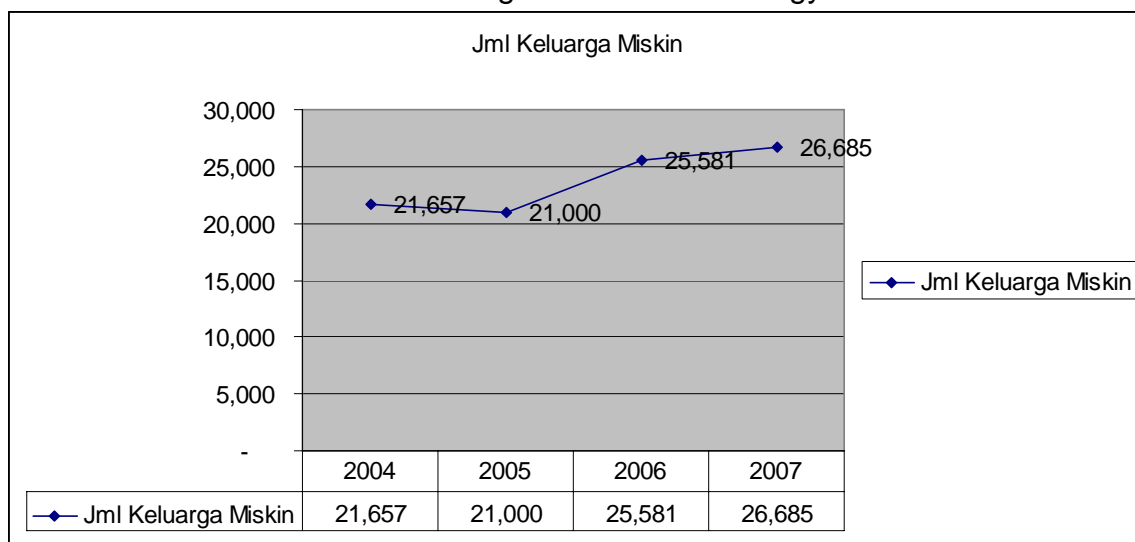
Kepentingan data valid keluarga dan penduduk miskin sangat diperlukan terlebih pada awal intervensi program sekaligus sebagai alat ukur evaluasi atau keberhasilan kinerja program. Parameter data keluarga miskin kota Yogyakarta yang sedikit berbeda dengan parameter data kemiskinan nasional atau sektoral merupakan upaya pemerintah kota untuk menjangkau sasaran program-program kemiskinan secara lebih faktual dan mempertimbangkan kondisi lokal.

Hasil pendataan dengan menggunakan parameter lokal yang menunjukkan angka keluarga dan penduduk miskin lebih besar dari pendataan BPS adalah merupakan konsekuensi dari kebijakan kota yang menetapkan garis kemiskinan dengan kualitas yang relatif lebih tinggi dari garis kemiskinan pada umumnya. Kebijakan ini dilandasi dengan orientasi bahwa kelompok-kelompok yang selama ini dianggap tidak miskin tetapi rentan miskin dimasukkan kedalam kelompok keluarga atau penduduk miskin. Beban jumlah kemiskinan yang relatif besar dari penggunaan parameter ini pada titik awal akan memberikan peluang sustainabilitas yang tinggi pada tahap jangka panjang pada saat angka kemiskinan telah mampu ditekan dalam angka yang signifikan.

Data penduduk dan keluarga miskin tidak hanya akan ditemukan jumlah atau angka dari keseluruhan penduduk atau keluarga miskin. Program-program instansional

yang membutuhkan guiden permasalahan kemiskinan sesuai dengan tugas pokoknya perlu disuport dengan ketersediaan data kemiskinan sesuai dengan permasalahan yang bsia dikonfersi sebagai sasaran intervensi intansi. Melalui 34 variabel yang terbagi dalam parameter pendataan (18 indikator) dan atribut atau deskripsi kemiskinan maka upaya-upaya detail intervensi pada keluarga atau penduduk miskin dari tahap data bisa disuport.

Tabel. 23.  
Jumlah Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta



Gradasi kemiskinan dengan 3 (tiga) kelompok miskin merupakan upaya untuk memberikan petunjuk yang lebih spesifik dari masing-masing kelompok sehingga program-program penanggulangan kemiskinan tidak lagi menggunakan asumsi makro yang menyamakan semua permasalahan kemiskinan.

Untuk kebutuhan valditas data dan dalam rangka media pengukuran hasil maka keberadaan data keluarga dan penduduk miskin akan selalu dilakukan Up-date untuk setiap tahunnya.

#### 4.2.2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin.

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dilakukan dengan pendekatan pemenuhan hak dasar. Daam jangka pendek dan menengah penanganan kemiskinan dan penganguran dengan pendekatan program dilakukan dengan pendekatan pemenuhan hak masyarakat miskin (pengangguran dikelompokan dalam permasalahan kemsकिन). Pendekatan pemenuhan hak dasar atau berbasis hak (*Right based approach*) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need aproach*) merupakan upaya-upaya awal untuk memberikan kepada

masyarakat miskin untuk bisa memperoleh hak-hak dan kebutuhan hakikinya baik melalui upaya mandiri ataupun melalui upaya pemberian dari pihak lain.

Pendekatan ini memberikan porsi yang jelas bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyediakan layanan-layanan dasar sehingga keseluruhan kelompok masyarakat bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

#### **4.2.3. Pengembangan SDM Penduduk Miskin.**

Pengembangan SDM penduduk miskin merupakan intervensi dalam bentuk sikap mental dan kemampuan kompetitif penduduk miskin. Dari aspek penanggulangan pengangguran peningkatan nilai kompetitif penduduk miskin akan memberikan peluang mereka untuk mampu bersaing memperoleh kesempatan kerja atau berusaha.

Pengembangan SDM penduduk miskin dimulai dengan pendekatan standar yakni penjaminan keterpenuhan kebutuhan pendidikan dasar 12 tahun dengan program keterpihakan kepada masyarakat miskin adalah pemberian jaminan biaya pendidikan. Secara jangka menengah dan panjang pendidikan sebagai media penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan upaya optimalisasi fungsi anak untuk media keluar dari keterlilitan kemiskinan.

Dalam jangka pendek pengembangan SDM penduduk miskin ini adalah dengan pemberian angsupan gizi pada BALITA dari keluarga miskin. Pendekatan ini adalah untuk memberikan basis generasi yang bisa dikembangkan secara optimal termasuk dari kelompok penduduk miskin.

Pada aspek ekonomi pengembangan SDM keluarga miskin dilakukan masih dalam tahapan pengenalan usaha ekonomi produktif melalui kegiatan-kegiatan KUBE dan kegiatan kelompok lainnya.

#### **4.2.4. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin.**

Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin merupakan tahapan dampak dari hasil-hasil intervensi awal dari penanganan kemiskinan dan pengangguran. Upaya peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan mendasarkan pada potensi-potensi yang sudah berkembang pada internal keluarga atau suatu komunitas masyarakat miskin. Bentuk-bentuk umum lebih merupakan upaya pemberdayaan sosial ekonomi penduduki miskin.



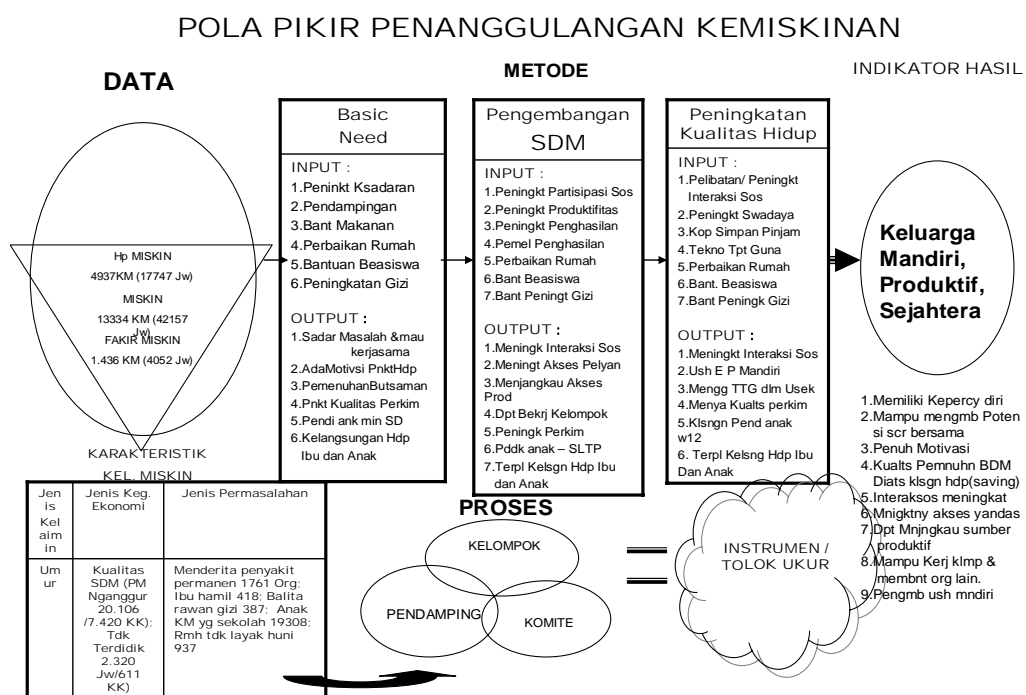
#### 4.2.5. Pelembagaan Stake Holder Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Ditingkat Basis (Kelurahan).

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan lebih mempunyai kemampuan untuk optimal dan lestari apabila stake holder ditingkat basis dilibatkan secara optimal. Pelibatan stake holder ini sangat penting untuk memberikan keterjaminan ketepatan sasaran dan kontrol pelaksanaan program sekaligus optimalisasi sumber-sumber lokal. Pelembagaan dalam arti yang lebih dalam adalah diperlukannya suatu pihak yang merupakan kelompok peduli yang terdiri dari berbagai pihak mewakili unsur pemerintah (kelurahan) tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat (LPMK/PKK dan lembaga keagamaan atau sosial) dan pelaku usaha yang memdudukan diri sebagai pihak peduli dalam rangka penanggungan kemiskinan dan pengangguran. Fungsi kelembagaan ditingkat basis ini idengtik dengan kelembagaan TKPK ditingkat kota Yogyakarta.

Pelembagaan kelompok keluarga atau penduduk miskin dengan ikatan kebersamaan usaha merupakan syarat mutlak untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Kelompok-kelompok ditumbuhkan dalam basis komunitas sehingga dalam masing-masing kelurahan dimungkinkan ditumbuhkan beberapa kelompok usaha.

Keberadaan pendamping sebagai pihak yang aktif memberikan supervisi dan bimbingan teknis merupakan prasyarat keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Gambar 1  
Pola Pikir Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.



Matrik Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta tahun 2007–2011 adalah sebagai berikut:

### 4.3. MATRIK PROGRAM KEGIATAN

#### RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN 2007 - 2011

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
1	Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar 12 Tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau	Program wajib belajar 12 Tahun	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 90% menjadi 100%	90%	100%		9,346	9,814	12,365	12,365	12,565	56,455
		1 Pengelolaan Pemberian Beasiswa (gakin, retrieval, bantuan pendidikan)	Beasiswa 80% menjadi 100% untuk warga kota yang tidak mampu	80%	100%	Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		2 Pemberian Bantuan UAN/UAS				Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		3 Pemberantasan Buta Aksara				Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		4 BKM SMA SMK				Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	
		5 Beasiswa Total Dalam Rangka Penyaluran Siswa Keluarga Miskin Pada SMK				Dinas Pendidikan	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
2	Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Berbagai Kelompok Masyarakat	Program pengembangan jaminan Kesehatan masyarakat  1 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Kelompok	Meningkatnya layanan Asuransi Kesehatan bagi seluruh masyarakat 37% menjadi 60%	37%	60%	Dinas Kesehatan	8,080	9,284	9,200	10,320	9,760	46,644
3	Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja  1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja 2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 3 Pendidikan dan Pelatihan Tambahan Ketrampilan Teknis Bagi Siswa SMK dari Keluarga Miskin	Jumlah pencari kerja terlatih 3,43% menjadi 10,92%	3,43%	10,92%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,080	1,140	1,200	1,260	1,320	6,000

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
		<b>Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</b>	<b>Menurunnya Jumlah Penganggur dari 6,16% menjadi 5,73%</b>	<b>6,16%</b>	<b>5,73%</b>		<b>785</b>	<b>828</b>	<b>872</b>	<b>915</b>	<b>959</b>	<b>4,359</b>
		1Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V	V	V	V	V	
		2Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V	V	V	V	V	
		3Fasilitasi Penempatan Transmigrasi				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V	V	V	V	V	
		3Fasilitasi Penempatan Kerja Lulusan SMK dari Keluarga Miskin				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
4	Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada lima kelompok masyarakat yaitu : perempuan; anak; lansia; penduduk miskin dan defabel	<p>Program Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, lansia dan defabel serta pengarusutamaan gender</p> <p>1 Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan</p> <p>2 Pengarusutamaan Gender</p> <p>3 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Spirit Mental Keagamaan Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan</p>	Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 40% menjadi 60%	40%	60%		1,075	1,175	1,465	1,550	1,750	7,015
						Bagian Kesmas dan PUG	V	V	V	V	V	
						Bagian Kesmas dan PUG	V	V	V	V	V	
						Bagian Kesmas dan PUG		V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya PSKS naik 10%</b>		<b>10%</b>		990	990	990	990	991	<b>4,951</b>
		1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesos				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		3 Kerjasama antar FKPSM				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		4 Bantuan Operasional FKPSM				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		5 Bimbingan Pengurus Orsos				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Menurunnya PMKS sebesar 10%</b>		<b>10%</b>		<b>6,310</b>	<b>7,491</b>	<b>8,172</b>	<b>8,853</b>	<b>9,534</b>	<b>40,360</b>
		1Pendataan PMKS dan PSKS				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		2Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		3Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		4Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		5Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		6Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		7Santunan Kematian Pemegang KTP di Yogyakarta				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	



NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
		8Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		9Peningkatan Pelayanan PMKS				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		10Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi KK Miskin				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		11Penumbuhan USEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		12Bimbingan Pemantapan Pengembangan KUBE Keluarga Fakir Miskin				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		13Perbaikan Rumah Keluarga Tidak Layak Huni				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		14Bantuan Makan Kepada LU terlantar				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		15Bimbingan dan Bantuan UEP bagi LU terlantar				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
		16Bantuan Tambahan Makanan bagi anak cacat				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		17Pelatihan Ketrampilan dan PBK bagi anak terlantar				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		18Pembinaan dan penyantunan AT keluarga tidak mampu, yatim, piatu dan yatim piatu				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		19Revitalisasi paca				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		20Bimbingan UEP Eks Penyakit Kronis				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		21Bimbingan Pengembangan Usaha Mandiri Paca				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	
		22Bimbingan Sosial dan Ketrampilan bagi Eks Penyakit Jiwa				Dinas Kesejahteraan Sosial	V	V	V	V	V	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
		23 Pelayanan dan Rehab Korban NAPZA Luar Panti 24 Bantuan Beras Miskin				Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial	V V	V V	V V	V V	V V	
		Program fasilitasi dan inisiasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat  1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 2 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 50% menjadi 80%	50%	80%		320	370	330	380	400	1,800
						Bagian Kesmas dan PUG Bagian Kesmas dan PUG	V V	V V	V V	V V	V V	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
5	Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan surveillance serta monitoring kesehatan	Program Keluarga Berencana  1 Peningkatan KB - KS	Terkendalinya angka kelahiran, CBR=16,00 - 21,24 menjadi CBR=14,84 - 20,18	CBR=16,00-21,24	CBR=14,84-20,18	BKKBC	214	235	235	258	284	1,226
6	Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK 1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan 2 Pendampingan Industri Mikro dan Kecil 3 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah 4 Bimbingan Penerapan Teknologi Produksi	Meningkatnya Omset UMKMK dari 100 Miliar menjadi 131 Miliar	100 M	131 M	Dinas Perindagkop  Dinas Perindagkop  Dinas Perindagkop  Dinas Perindagkop	2,850	2,467	3,405	3,449	3,953	16,124

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM			SKPD	PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)					
			KUALITATIF	KUANTITATIF			2007	2008	2009	2010	2011	JUMLAH
				2007	2011							
7	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik	<p>Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan</p> <p>1 Pembangunan Pagar Bangunan panti Wreda dan Panti Asuhan</p> <p>2 Pemb. Pasar Talok</p> <p>3 Rehabilitasi Gedung Pantikarya</p>	Pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 95%	80%	95%		27,702	34,470	40,350	51,321	55,400	209,243
						BPBD	V	V	V	V	V	
						BPBD	V	V	V	V	V	
						BPBD	V	V	V	V	V	
8	Meningkatkan Fungsi Kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	<p>Program pengelolaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman, pemeliharaan dan pengembangan perumahan dan permukiman</p> <p>1 Counterpart Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan</p> <p>2 Counterpart Pengembangan /Pelaksanaan Perumahan Sederhana</p>	Terkelolanya PSD permukiman 20 %, Rasio jumlah KK terhadap jumlah rumah yang layak huni 10 %		20%;10%		2,349	2,479	2,610	3,190	3,740	14,368
						Dinas Kimpraswil	V	V	V	V	V	
						Dinas Kimpraswil	V	V	V	V	V	

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **5.1. Optimalisasi Fungsi Koordinasi TKPK Kota Yogyakarta.**

Langkah-langkah awal dalam arah intervensi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menerapkan kebijakan teknis penyediaan sarana dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi masyarakat miskin melalui pendekatan intervensi atribut permasalahan kemiskinan. Sesuai dengan alat ukur atau parameter kemiskinan yang ada maka dalam intervensi yang dilakukan adalah :

#### **5.2. Membangun Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.**

Langkah-langkah awal dalam arah intervensi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menerapkan kebijakan teknis penyediaan sarana dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi masyarakat miskin melalui pendekatan intervensi atribut permasalahan kemiskinan. Sesuai dengan alat ukur atau parameter kemiskinan yang ada maka dalam intervensi yang dilakukan adalah :

##### **5.2.1. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Keluarga.**

Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui intervensi berbagai kebijakan yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan produksi usaha. Dengan mempertimbangkan bahwa penciptaan lapangan kerja sampai dengan tahapan sustainability yang relatif aman memerlukan waktu yang relatif panjang maka dalam kegiatan-kegiatan ini sampai dengan tahun 2011 atau kurun waktu jangka menengah lebih memberikan landasan-landasan untuk menguatnya sektor riil ditingkat ekonomi mikro dan industri rumah tangga yang padat karya serta industri manufaktur menengah.

Pada tahap awal upaya yang akan dilakukan adalah dengan melalui :

1. Penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro melalui kelompok usaha bersama atau perorangan.
2. Revitalisasi wilayah sentra industri rumahtangga melalui penyediaan sarana dan teknologi tepat guna untuk memberikan daya saing dan daya tahan pasar pada produk dan proses industri yang sudah berjalan.
3. Penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro.
4. Akses permodalan melalui mekanisme kredit lunak bagi kelompok usaha bersama, koperasi dan usaha mikro/kecil dengan bunga rendah.
5. Penataan dan upaya pelestarian sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku.

6. Pembangunan infrastruktur dengan menyerap tenaga kerja lokal.

### **5.2.2. Penyediaan Layanan Pendidikan.**

Impact keterpenuhan kebutuhan pendidikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam banyak evaluasi lebih merupakan pengaruh jangka menengah dan panjang. Meskipun demikian pendekatan penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan merupakan upaya yang cukup esensial dan substansi karena melalui proses ini bisa diimprov upaya-upaya penguatan personal SDM dan peningkatan daya saing tenaga kerja sehingga secara personal akan lebih potensial memiliki peluang survive.

Kota Yogyakarta menetapkan pendidikan dasar adalah 12 tahun sehingga mempunyai kewajiban untuk menjamin dan menjaga agar seluruh anak usia sekolah termasuk dari kelompok keluarga miskin mampu memperoleh pendidikan minimal sampai jenjang SMA/SMK.

Pada pemenuhan hak pendidikan ini upaya yang dilakukan adalah dengan melalui :

- 1) Jaminan pendidikan daerah dimana melalui pelaksanaan jaminan ini rasio partisipasi sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK sampai dengan tahun 2011 mendekati angka 100 %. Angka ini termasuk usia sekolah dari anggota keluarga miskin diwilayah Kotab Yogyakarta.
- 2) Pengorientasian lulusan SMP dari siswa keluarga miskin masuk ke kelompok pendidikan SMK melalui stimulus bantuan biaya pendidikan total. Arah intervensi ini adalah untuk mendekatkan out-put proses didik dari anggota keluarga miskin pada spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
- 3) Peningkatan keterampilan melalui pembekalan live skill bagi siswa keluarga miskin yang sekolah pada kelompok sekolah SMK.
- 4) Bantuan stimulan atau pinjaman biaya penempatan kerja bagi lulusan SMK dari keluarga miskin.

### **5.2.3. Penyediaan Layanan Kesehatan.**

Kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak setiap warga termasuk warga keluarga atau penduduk miskin. Diwilayah kota Yogyakarta sumber layanan kesehatan bagi penduduk miskin dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak pelaksana layanan yakni program ASKESKIN melalui PT. ASKES,, program JAMKESOS melalui pemerintah Propinsi DIY dan melalui JAMKESDA yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Yogyakarta.

Jumlah rasio kemampuan layanan dari ketiga sumber layanan kesehatan tersebut berada diatas angka jumlah penduduk miskin. Untuk tahun 2008 layanan ASKESKIN bagi penduduk miskin kota Yogyakarta melalui PT. ASKES memberikan kuota layanan bagi 68.456 jiwa, program JAMKESOS memberikan layanan bagi penduduk miskin kota Yogyakarta sebanyak 21.000 jiwa dan

layanan JAMKESDA sebagai penunjang program layanan kesehatan dimaksud.. Dengan rasio tingkat utility 20 % tidak terdapat permasalahan yang substansi dalam layanan ini. Permasalahan yang perlu memperoleh perhatian adalah ketepatan dan kejelasan pembagian data untuk masing-masing layanan.

Untuk layanan kebutuhan kesehatan bagi penduduk miskin ini kebijakan yang dilakukan adalah :

- 1) Penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan bagi penduduk miskin.
- 2) Fasilitasi dan penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta.
- 3) Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan balita.
- 4) Menurunkan tingkat angka kesakitan pada kasus-kasus penyakit permanen.

#### **5.2.4. Penyediaan Layanan Jaminan Ketersediaan Pangan.**

Tujuan penyediaan jaminan ketepenuhan kebutuhan pangan adalah upaya untuk memenuhi kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau serta meningkatkan gizi masyarakat miskin terutama ibu, bayi dan balita. Diwilayah kota Yogyakarta layanan paling dasar dari upaya ini adalah melalui program raskin dan bantuan vover pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dari keluarga miskin. Kebijakan lebih lanjut untuk program tersebut adalah :

- 1) Antisipasi pemenuhan kebutuhan pokok dan beras bagi masyarakat miskin.
- 2) Antisipasi pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga melalui Program Keluarga harapan.
- 3) Tambahan asupan gizi keluarga miskin.

#### **5.2.5. Penyediaan Keterpenuhan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni.**

Masalah pemukiman dan perumahan merupakan masalah yang cukup urgen bagi kota Yogyakarta. Secara fisik masalah ini terlihat dengan bentuk adanya pemukiman atau rumah yang tidak memenuhi kelayakan huni baik dari aspek fisik ataupun sosial. Diwilayah kota Yogyakarta yang secara demografis hanya memiliki luas wilayah 32,5 Km persegi, rasio kelayakan luas lahan huni dengan hitungan minimal 8 m persegi sulit untuk dipenuhi.

Aspek fisik pemukiman lain yang bisa diintervensi oleh kebijakan publik adalah melakukan intervensi pada bentuk atau penggunaan bahan bangunan dan model bangunan yang minimal memenuhi prinsip kesehatan dan sosial. Beberapa program ideal dengan bentuk penyediaan RUSUNAWA telah dilakukan dengan sasaran pengguna dari program ini harus diprioritaskan bagi keluarga dan penduduk miskin. Beberapa kegiatan yang telah dan masih akan dilanjutkan dalam penyediaan rumah yang layak huni ini adalah :

- 1) Rehabilitasi Sosial daerah kumuh.
- 2) Fasilitasi pemugaran Rumah kurang layak huni.
- 3) Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhanan (RUSUNAWA).



### **5.2.6. Penyediaan Keterpenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Yang Baik.**

Masalah kemiskinan perkotaan dalam sisi fisik selain papan adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik untuk kelompok masyarakat miskin. Aspek ini perlu dipikirkan karena keterbatasan daya dukung tanah diwilayah perkotaan sangat terbatas dan memerlukan intervensi pemerintah untuk mengatur. Sesuai dengan kondisi dan rata-rata pada umumnya kepemilikan rumah atau tempat tinggal dengan space luasan yang sangat minimal maka model pemenuhan air bersih dan sarana sanitasi ini perlu disediakan dengan standarisasi layanan komunal atau kelompok.

Program atau intervensi yang perlu dan telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah :

- 1) Penyediaan jalur distribusi PAM untuk pemukiman kelompok masyarakat miskin.
- 2) Pembuatan sarana MCK Umum.
- 3) Pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi komunal secara merata.

### **5.2.7. Penguatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin.**

Intervensi pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hidup bagi keluarga dari kelompok keluarga miskin lebih bersisi psikis dan frame berpikir produktif. Sebagai basis pemberdayaan perlu dilakukan untuk menumbuhkan spirit internal sehingga program-program yang menysasar pada kelompok keluarga miskin mampu direspon oleh mereka. Beberapa kegiatan yang telah dan perlu dikembangkan adalah :

- 1) Layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur dari keluarga miskin.
- 2) Pendampingan atau advokasi keluarga miskin.
- 3) Pendampingan penumbuhan usaha keluarga miskin.
- 4) Penguatan Usaha ekonomi produktif keluarga miskin mealui kegiatan KUBE dan kelompok lainnya..
- 5) Peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan keluarga miskin.
- 6) Pendampingan religius bagi keluarga dan penduduk miskin.

### **5.2.8. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui Panti Sosial.**

Layanan melalui keberadaan panti sosial ini merupakan layanan bagi masyarakat dan penduduk miskin akut atau bahkan sampai pada tahapan terlantar. Keberadaan layanan merupakan bentuk fungsi pemeliharaan, perlindungan atau pengasuhan orang atau anak terlantar oleh pemerintah. Diwilayah kota Yogyakarta panti layanan sosial tersebut dilaksanakan oleh panti pemerintah dan panti sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk layanan dalam panti ini adalah :

- 1) Layanan lansia terlantar dalam panti.
- 2) Layanan anak terlantar dalam panti.
- 3) Layanan tuna sosial terlantar dalam panti.

### **5.3. Pelaksanaan.**

Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran memandang kemiskinan sebagai masalah multidimensi. Pendekatan yang dipakai selain menggunakan pendekatan dari jumlah pendapatan, juga meliputi kerentanan atau kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks meliputi persoalan terkait dengan lemahnya kapabilitas, lemahnya kelembagaan, kerentanan dan ketidak berdayaan. Aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi dalam suatu sistem kemiskinan, artinya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama aspek tersebut akan menjadi penyebab atau akibat dari lainnya.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang berakibat pada ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (sosial).

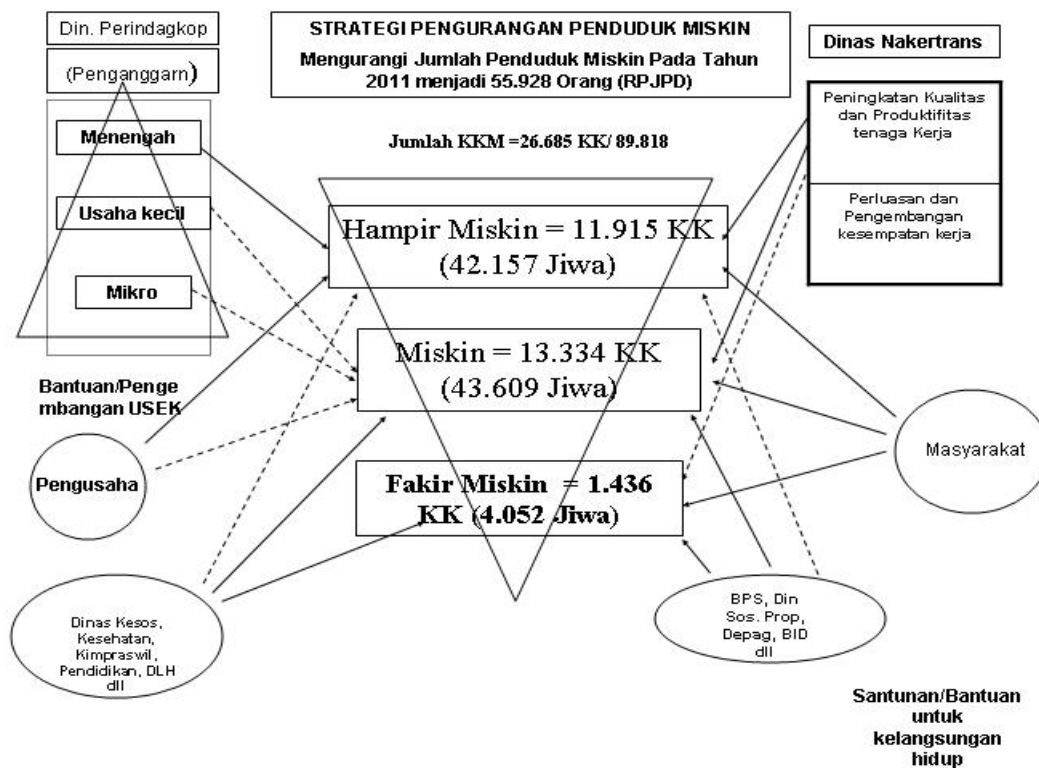
Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, dan segenap pelaku ekonomi.

#### **5.3.1. Sinergi Program Instansi dan Institusi Dalam Penanggulangan Kemiskinan.**

Program pengentasan kemiskinan, baik pada tingkat pusat maupun di daerah, melibatkan banyak instansi pemerintah dan swasta. Keterlibatan sedemikian banyak instansi telah mengakibatkan munculnya berbagai kebijakan kemiskinan yang tergantung pada minat dan bidang masing-masing instansi. Oleh karena itu, tidak jarang program-program pengentasan maupun pemberdayaan penduduk miskin tersebut tumpang-tindih. Salah satu kelemahan sistem birokrasi di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antar instansi. Untuk menghindari tumpang-tindihnya program yang dimiliki oleh berbagai instansi, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang memuat berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah. Sistem informasi ini tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kepentingan publik sehingga mereka dapat secara aktif melakukan perubahan hidup sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakatnya.

Namun berbagai program yang dikeluarkan masih belum dapat menyelesaikan akar kemiskinan yang sebenarnya, sehingga memberikan kesan bahwa program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sebagai suatu bentuk pensikapan yang gagap dan tidak terencana. Berangkat dari asumsi tersebut di atas maka titik tolak dari maka penyusunan program penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari data riil penduduk miskin yang ada di Kota Yogyakarta dan terbukanya masing-masing instansi untuk mensinergikan dengan kegiatan instansi lain.

Dalam bentuk model atau gambar strategi program dan sasaran masing-masing instansi dan institusi tersebut adalah sebagaimana dalam gambar berikut



Dalam bentuk matrik program antar instansi untuk membangun sinergisitas pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran tersebut adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel. 24.  
Program antar instansi untuk membangun sinergisitas pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran

Arah Intervensi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Target Intervensi dan Keterangan Fase Masuk Program	Impact Intervensi	Instansi dan Institusi Terkait.
1. Penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro melalui kelompok usaha bersama atau perorangan.	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Merupakan intervensi tahap awal untuk keluarga miskin dengan seleksi potensi.	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Disperindagkop, Dinas Kesos, LSM, P2KP, NUNSP.
2. Revitalisasi wilayah sentra industri ru	Penguatan dan pengembangan wilayah	Pengentasan pengangguran.	Disperindagkop, masyarakat

<p>mahtanga melalui pe nyediaan sarana dan teknologi tepat guna untuk memberikan daya saing dan daya tahan pasar pada produk dan proses industri yang sudah berjalan.</p> <p>3. Penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro.</p> <p>4. Akses permodalan melalui mekanisme kredit lunak bagi kelompok usaha bersama, koperasi dan usaha mikro / kecil dengan bunga rendah.</p> <p>5. Penataan dan upaya pelestarian sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku.</p> <p>6. Pembangunan infrastruktur dengan menyerap tenaga kerja lokal.</p>	<p>sentra industri. Merupakan intervensi tahap awal untuk mempertahankan potensi komunitas wilayah sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat.</p> <p>Tersedianya layanan modal pada tataran basis. Merupakan intervensi tahap awal untuk sasaran terseleksi</p> <p>Tersedianya modal usaha pengembangan dan akses pada mekanisme layanan perbankan. Merupakan program tahap lanjut untuk sasaran terseleksi.</p> <p>Kelestarian aktifitas ekonomi masyarakat kecil dalam bentuk fasilitas penataan dan perlindungan pasar.</p> <p>Merupakan intervensi lanjut bagi pelaku usaha kecil. Terakomodasinya pengan guran dalam kegiatan pem bangunan local. Merupakan intervensi awal.</p>	<p>Pengentasan kemiskinan</p> <p>Pengentasan kemiskinan.</p> <p>Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.</p> <p>Pengentasan pengangguran.</p>	<p>pelaku usaha.</p> <p>Disperindakop, Dinas kesos, LKM, P2KP, Bank.</p> <p>Disperindakop, Dinas Kesos, LSM, Bank.</p> <p>Disperindakop, Dinas Pasar.</p> <p>Kimpraswil, NUNSP, P2KP.</p>
<p>1. Jaminan pendidikan daerah dimana melalui pelaksanaan jaminan ini rasio partisipasi sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK sampai dengan tahun 2011 mendekati angka 100 %. Angka ini termasuk usia sekolah dari anggota keluarga miskin diwilayah Kotab Yogyakarta.</p> <p>2. Pengorientasian lulusan SMP dari siswa keluarga miskin masuk ke kelompok pendidikan SMK melalui stimulus bantuan biaya pendidikan total. Arah intervensi ini adalah untuk mendekatkan out-put proses didik dari anggota keluarga miskin pada spe</p>	<p>Peningkatan kualitas dasar SDM penduduk miskin khususnya usia sekolah. Merupakan intervensi dasar dan awal.</p> <p>Pendekatan out-put pendidikan kedalam dunia kerja. Merupakan bentuk keterpihakan kebijakan pada kelompok penduduk miskin, khususnya siswa miskin. Merupakan intervensi lanjut setelah program jaminan pendidikan.</p>	<p>Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.</p> <p>Pengentasan pengangguran dan kemiskinan.</p>	<p>Dinas Pendidikan, Pelaku pendidikan.</p> <p>Dinas pendidikan, pelaku pendidikan.</p>

<p>sifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja.</p> <p>3. Peningkatan keterampilan melalui pembekalan live skill bagi siswa keluarga miskin yang sekolah pada kelompok sekolah SMK.</p> <p>4. Bantuan stimulan atau pinjaman biaya penempatan kerja bagi lulusan SMK dari keluarga miskin.</p>	<p>Meningkatnya core competitive siswa dari keluarga miskin untuk bersaing dalam penempatan kerja. Merupakan program lanjut setelah jaminan pendidikan.</p> <p>Keterpihakan program pada penduduk miskin sebagai bentuk advokasi pengentasan. Merupakan intervensi tahap lanjut.</p>	<p>Pengentasan pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>Pengentasan pengangguran dan kemiskinan.</p>	<p>Dinas Pendidikan, Dinas Nakertrans, BLK.</p> <p>Dinas Pendidikan, Dinas Nakertrans.</p>
<p>1. Penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan bagi penduduk miskin.</p> <p>2. Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan balita.</p> <p>3. Menurunkan tingkat angka kesakitan pada kasus-kasus penyakit permanen.</p>	<p>Keterpihakan pada kelompok penduduk miskin. Merupakan intervensi awal penyediaan layanan kesehatan.</p>	<p>Pengentasan kemiskinan.</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pelaku layanan asuransi.</p>
<p>1. Penambahan jumlah sasaran miskin.</p> <p>2. Penyertaan dalam Program Keluarga Harapan.</p> <p>3. Tambahan ansuran gizi keluarga miskin.</p>	<p>Keterpihakan program pada kelompok masyarakat miskin. Merupakan intervensi awal penyediaan pangan.</p>	<p>Pengentasan kemiskinan.</p>	<p>Dinas Kesos, Dinas perindakop, Bulog.</p>
<p>1. Program Rehabilitasi Sosial daerah kumuh.</p> <p>2. Fasilitasi pemugaran Rumah kurang layak huni.</p> <p>3. Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhanan (RUSUNAWA).</p>	<p>Keterpihakan program pada kelompok komunitas masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi perbaikan lingkungan dan rumah. Merupakan intervensi tahap awal dan lanjut.</p>	<p>Fasilitasi dan penataan lingkungan komunitas miskin.</p>	<p>Dinas Kesos, Dinas Kimpraswil.</p>
<p>1. Penyediaan jalur distribusi PAM untuk pemukiman kelompok masyarakat miskin.</p> <p>2. Pembuatan sarana MCK Umum.</p> <p>3. Pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi komunal secara merata.</p>	<p>Ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi serta lingkungan sehat bagi penduduk miskin.</p>	<p>Fasilitasi dan penataan lingkungan sehat komunitas miskin.</p>	<p>Dinas Kimpraswil, Dinas L dan pertamanan.</p>
<p>1. Layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur dari keluarga miskin.</p>	<p>Kontrol pertumbuhan alami penduduk miskin. Merupakan intervensi awal.</p>	<p>Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.</p>	<p>BKKBC, LSM. Dinas Kesos, Dinas Perindakop, LSM.</p>

2. Pendampingan atau advokasi keluarga miskin.	Penumbuhan inner motivation untuk berubah melalui spirit kewira-usahaan. Merupakan intervensi awal dan lanjut.	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.	Depag, masyarakat, lembaga keagamaan.
3. Pendampingan penumbuhan usaha keluarga miskin.	Terbentuknya basis aktifitas ekonomi produktif keluarga miskin. Penguatan basis aktifitas ekonomi produktif keluarga miskin. Merupakan intervensi awal selektif.	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.	
4. Penguatan Usaha ekonomi produktif keluarga miskin melalui kegiatan KUBE dan kelompok lainnya..			
5. Peningkatan partisipasi sosial masyarakat keluarga miskin.	Pemberdayaan social penduduk miskin. Merupakan intervensi awal dan lanjut.	Pemberdayaan menuju penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.	
6. Pendampingan religius bagi keluarga dan penduduk miskin.	Perubahan pola pikir dan tumbuhnya spirit berubah melalui pendekatan keagamaan.		
1. Layanan lansia terlantar dalam panti.	Terselenggaranya perlindungan dan pengampunan penduduk miskin terlantar.	Penanggulangan kemiskinan.	Dinas Kesos, ORSOS.
2. Layanan anak terlantar dalam panti.			
3. Layanan tuna sosial terlantar dalam panti.			

### 5.3.2. Kelembagaan

- a. RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan keterkaitan dalam pelaksanaannya.
- b. Melibatkan stakeholder dalam jejaring yaitu pemerintah, swasta masyarakat dan lembaga lainnya.
- c. Melibatkan masyarakat dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan.
- d. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sampai ditingkat kelurahan.
- e. Optimalisasi Koordinasi Penanggulangan Pengangguran.

### 5.3.3. Pendanaan

- a. Sumber pendanaan APBD, APBN dan dukungan swasta serta lembaga donor.
- b. Anggaran dari APBD dan APBN dialokasikan secara rutin untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan program.

- c. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam dukungan pendanaan untuk mengantisipasi keterbatasan dana pemerintah.

#### **5.3.4. Indikator**

Keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diukur dari tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang berdampak pada:

- a. Menurunnya angka kemiskinan;
- b. Rendahnya tingkat rentan miskin/hampir miskin
- c. Menurunnya angka pengangguran;
- d. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja.

## **BAB. VI**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah (RAD) ini disusun sebagai acuan dalam rangka melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pengelola dan pelaksana program dengan instansi terkait yang dilakukan secara bersama dan berkesinambungan untuk kurun waktu Tahun 2007 – 2011.

Berhasilnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta diperlukan komitmen yang kuat konsisten dan konsekuen dari semua pihak baik dari unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ini akan dijabarkan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahunan dari masing-masing SKPD.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**